



Disdukcapil
KABUPATEN BANDUNG



PROFIL PERKEMBANGAN PENDUDUK

 disdukcapil.bandungkab.go.id

 0853-1820-2833

 @disdukcapilbandungkab

 @dukcapilkabbdg

2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2024. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perkembangan penduduk di Kabupaten Bandung serta sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini berisi gambaran secara umum tentang kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bandung.

Bahan Data pembuatan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2024 diambil berdasarkan data hasil konsolidasi Kemendagri semester II tahun 2024 yang juga didukung dari data perangkat daerah terkait untuk menyempurnakan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak akan sempurna tanpa saran dan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami sangat menghargai masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang berguna dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung beserta seluruh *stakeholder* di Pemerintah Kabupaten Bandung serta Masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG



Drs. N. Yudi Abdurahman, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19690717 199003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
1. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Sumber Data	4
E. Pengertian Umum Terhadap Istilah yang Digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan	4
2. BAB II gambaran umum daerah.....	11
A. Letak Geografis	11
B. Kondisi Demografis Daerah.....	12
C. Gambaran Ekonomi Daerah.....	14
D. Potensi Daerah.....	15
3. BAB III perkembangan kependudukan	20
A. Kuantitas Penduduk.....	20
1. Jumlah dan persebaran Penduduk.....	20
2. Penduduk menurut karakteristik demografi.....	26
B. Kualitas Penduduk	49
1. Indikator Kesehatan	49
2. Indikator Pendidikan	56
3. Indikator Ekonomi.....	60
4. Indikator Sosial	64
C. Mobilitas Penduduk.....	67
1. Migrasi Masuk.....	67
2. Migrasi Keluar	69
4. BAB IV kepemilikan dokumen kependudukan.....	72
A. Kepemilikan Kartu Keluarga	72
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.....	73

C. Kepemilikan Akta.....	76
1. Akta Kelahiran.....	76
2. Akta Perkawinan.....	78
3. Akta Perceraian	79
4. Akta Kematian.....	81
5. BAB V kesimpulan.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 Per Tahun 2021-2024.....	133
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	211
Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung per Kecamatan.....	222
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	26
Tabel 3.4 Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan.....	288
Tabel 3.5 Pengelompokan Usia Muda, Usia Produktif dan Usia Tua.....	311
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kelompok Umur	333
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Status Kawin	344
Tabel 3.8 Jumlah Kepala Keluarga	35
Tabel 3.9 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	377
Tabel 3.10 Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga	388
Tabel 3.11 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Usia	399
Tabel 3.12 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin.....	40
Tabel 3.13 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin	411
Tabel 3.14 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan	422
Tabel 3.15 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja.....	43
Tabel 3.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	444
Tabel 3.17 Kelompok Usia berdasarkan Pendidikan Terakhir	444
Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	455
Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Disabilitas berdasarkan Jenis Kelamin	477
Tabel 3.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah.....	488
Tabel 3.21 Rasio Anak dan Perempuan per Kecamatan.....	522
Tabel 3.22 Angka Partisipasi Kasar SD (Sekolah Dasar)	577
Tabel 3.23 Angka Partisipasi Kasar SMP (Sekolah Menengah Pertama).....	588
Tabel 3.24 Angka Partisipasi Murni SD (Sekolah Dasar)	599
Tabel 3.25 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Kabupaten Bandung	60
Tabel 3.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan	61
Tabel 3.27 Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Bandung	61
Tabel 3.28 Proporsi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung	62
Tabel 3.29 Proporsi Penduduk Tidak Bekerja	63
Tabel 3.30 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung	64
Tabel 3.31 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung.....	65
Tabel 3.32 Tabel Angka Penyandang Cacat	66
Tabel 3.33 Migrasi Masuk (Datang) di Kabupaten Bandung.....	68
Tabel 3.34 Migrasi Keluar (Pindah) di Kabupaten Bandung	69
Tabel 4.1 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga.....	72
Tabel 4.2 Kepemilikan KTP Elektronik	75
Tabel 4.3 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun	77
Tabel 4.4 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan.....	78
Tabel 4.5 Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	79
Tabel 4.6 Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bandung	111
Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung	133
Gambar 3.1 Grafik Kepadatan Penduduk.....	233
Gambar 3.2 Diagram Kecamatan Terpadat.....	234
Gambar 3.3 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung.....	30
Gambar 3.4 Grafik Angka Partisipasi Kasar SD	577
Gambar 3.5 Grafik Angka Partisipasi Kasar SMP	588
Gambar 3.6 Grafik Angka Partisipasi Murni SD.....	599
Gambar 3.7 Grafik Angka Partisipasi Murni SMP.....	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek kependudukan adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah, sehingga informasi mengenai perkembangan kependudukan sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan menjadi strategi penting untuk meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan dalam program pembangunan. Salah satu isu utama dalam pembangunan wilayah adalah masalah kependudukan, yang juga berkaitan dengan integrasi berbagai aspek dalam perencanaan, pembangunan, dan pencapaian tujuan kependudukan itu sendiri. Upaya untuk menghubungkan perkembangan kependudukan dengan kebijakan pembangunan menjadi prioritas agar pengelolaan perkembangan kependudukan ke depan dapat mencapai keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk, serta mengarahkan mobilitas penduduk dan penyebarannya. Semua ini didukung dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, baik terkait masalah kependudukan, potensi sumber daya daerah, maupun informasi kewilayahan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan, diperlukan profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkala, yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data informasi kependudukan dan keluarga. Data dan informasi tersebut harus digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan (Pasal 49). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan di bidang

pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan ini kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal".

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan untuk menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berasal dari hasil registrasi penduduk, yang diperoleh melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini merupakan bagian dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen-elemen data yang diperlukan untuk menyusun Profil Perkembangan Kependudukan meliputi informasi mengenai kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi kependudukan di Kabupaten Bandung serta memprediksi prospek kependudukan di masa depan. Adapun penyusunan profil ini juga merupakan bentuk pemanfaatan data kependudukan yang tersedia di berbagai instansi.

B. Tujuan

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan Gambaran Kondisi Kependudukan

Profil ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi demografis suatu wilayah, termasuk jumlah, distribusi, dan karakteristik penduduk, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2. Memprediksi Prospek Kependudukan di Masa Depan

Dengan mengolah data kependudukan yang ada, profil ini diharapkan dapat memprediksi tren dan perkembangan kependudukan di masa depan, seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan pertumbuhan penduduk. Prediksi ini penting dalam merencanakan pembangunan dan kebijakan sosial.

3. Membantu Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Profil kependudukan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang disajikan membantu dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

4. Sebagai Sumber Data untuk Penyusunan Kebijakan

Data yang terkumpul dalam profil ini akan menjadi referensi utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.

5. Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi

Penyusunan profil juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan data kependudukan yang telah dikumpulkan dari berbagai instansi dan sumber untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Meningkatkan Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Profil ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang berbasis data kependudukan yang akurat.

Secara keseluruhan, tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah untuk menghasilkan data yang dapat dipergunakan dalam perencanaan yang lebih terukur, serta memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perkembangan penduduk.

C. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan merupakan gambaran tentang kondisi, perkembangan, dan proyeksi kependudukan di Kabupaten Bandung. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2024 meliputi:

1. Data Kuantitas Penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Data Kualitas Penduduk, meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
3. Data Mobilitas Penduduk, meliputi mobilitas permanen dan mobilitas non permanen dan urbanisasi.
4. Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

D. Sumber Data

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung 2024 ini, menggunakan data kependudukan yang diperoleh melalui registrasi yang tercatat dalam **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** Kabupaten Bandung yang telah dikonsolidasikan oleh **Kementerian Dalam Negeri**. Selain itu, data pendukung lainnya diperoleh dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, di antaranya **Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja** Kabupaten Bandung.

E. Pengertian Umum Terhadap Istilah yang Digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
4. **Warga Negara Indonesia** adalah orang –orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang–Undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).
5. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
6. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan /atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).

7. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
8. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
9. **Kartu Keluarga**, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
10. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, selanjutnya disingkat KTP-eL adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
11. **Petugas Registrasi** adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
12. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksanaan sebagai satu kesatuan (Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013).
13. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992).
14. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan manusia yang

bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (UU No.52 Tahun 2009).

15. **Profil Perkembangan Penduduk** adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
16. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).
17. **Kematian** atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangkan semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat Statistik).
18. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
19. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (UU No.52 Tahun 2009).
20. **Mobilitas penduduk permanen** (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).
21. **Mobilitas penduduk non permanen** (circucaltion/sirkuler) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang –alik melaju (commuting) dan menginap/mondok.
22. **Penduduk musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang.

23. **Mobilitas penduduk ulang-alik** atau nglaju (commuting) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
24. **Migrasi kembali** (return migration) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu pendataan bertempat tinggal didaerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal didaerah yang berbeda.
25. **Migrasi semasa hidup** (life time migration) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya.
26. **Migrasi risen** (recent migration) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
27. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi.
28. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah pedesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran – ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan , serta lembaga – lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya.
29. **Penduduk Usia Kerja** (Produktif) adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun
30. **Angka partisipasi angkatan kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
31. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.
32. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
33. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk usia 64 tahun ke atas.
34. **Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda – tanda kehidupan pada

- saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya (Biro Pusat Statistik).
35. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda –tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
 36. **Angka Kelahiran Kasar (CBR)** adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1.000 penduduk.
 37. **Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR)** banyaknya kelahiran setiap 1.000 Wanita yang berusia 15-49 tahun dalam satu tahun.
 38. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0 - 28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
 39. **Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1 - 11 Bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
 40. **Angka Kematian Bayi/IMR** adalah banyaknya kematian bayi kurang dari satu tahun (9 - 11 Bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
 41. **Angka Kematian, Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
 42. **Pengeluaran untuk makanan** adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).
 43. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
 44. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 Tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 Tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 Tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia

19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing–masing jenjang pendidikan.

45. **Pemanfaatan Data Kependudukan** adalah pemanfaatan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan satu- satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti : pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.



Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung

Tahun 2024



Landasan Konstitusional

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk.

Sumber Data

Hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil beserta data yang bersumber dari OPD terkait.



Tujuan Penyusunan

Menghasilkan data yang dipergunakan dalam perencanaan yang lebih terukur, serta memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perkembangan penduduk.



Ruang Lingkup

Melingkup kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan.



BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Letak Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 107°22' - 108°50' Bujur Timur dan 6°41' - 7°19' Lintang Selatan, yang berada di wilayah dataran tinggi. Dengan luas wilayah mencapai 176.238,67 hektar, sebagian besar kawasan Kabupaten Bandung dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung. Di sebelah utara, terdapat **Bukittunggal** dengan ketinggian 2.200 meter, serta **Gunung Tangkuban Parahu** setinggi 2.076 meter, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Sementara di sebelah selatan, terdapat beberapa gunung tinggi, di antaranya **Gunung Patuha** (2.334 meter), **Gunung Malabar** (2.321 meter), **Gunung Papandayan** (2.262 meter), dan **Gunung Guntur** (2.249 meter), yang berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bandung



Batas wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Bandung :

- Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Timur : Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut;
- Selatan : Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur;
- Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Kabupaten Bandung memiliki morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata variasi kemiringan lereng dari 0-8%, 8-15%, hingga lebih dari 45%. Wilayah ini beriklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim muson, dengan curah hujan tahunan rata-rata antara 1.500 mm hingga 4.000 mm. Suhu udara berkisar antara 12°C hingga 24°C, sementara kelembaban udara berada pada kisaran 78% di musim hujan dan 70% di musim kemarau.

Secara administratif, Kabupaten Bandung terbagi menjadi 31 kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Canguang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibum, Katapang, Kertasari, Kutawaringin, Majalaya, Margaasih, Margahayu, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali, Rancaekek, Solokan Jeruk, dan Soreang. Kabupaten ini juga mencakup 270 desa dan 10 kelurahan.

B. Kondisi Demografis Daerah

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 3.723.179 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.894.120 jiwa (50,90%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.829.059 jiwa (49,10%). Pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bandung menjadi 3.839.721 jiwa, terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.953.971 jiwa (50,88%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah 1.885.750 jiwa (49,12%). Adapun perkembangan penduduk dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 Per Tahun 2021-2024

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	LPP %
1	2021	1,849,361	1,784,076	3,633,437	1.41 %
2	2022	1,887,381	1,820,963	3,708,344	1.73 %
3	2023	1,894,120	1,829,059	3,723,179	1.29 %
4	2024	1,953,971	1,885,750	3,839,721	1.74 %

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah penduduk Kabupaten Bandung dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang terus berlanjut, baik jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin maupun jumlah total penduduk secara keseluruhan. Laju perkembangan penduduk pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk mencapai 1.29 %, sedangkan pada tahun 2024 laju penduduk naik menjadi 1.74 %. Adapun laju peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bandung selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung



Grafik di atas menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Bandung selama Empat tahun terakhir. Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata pertumbuhan penduduk antara tahun 2021 hingga 2024 adalah 38.514 jiwa atau 1,06%. Sementara itu, rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bandung selama empat tahun terakhir tercatat sebesar 1.74%.

Peningkatan jumlah penduduk perlu ditangani dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Pemerintah, melalui dinas dan instansi terkait, harus melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertambahan jumlah penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang perlu diatasi oleh pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah penyediaan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, seperti fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, dan kesehatan.

Secara sosial budaya, masyarakat Kabupaten Bandung tetap menunjukkan karakter yang ramah, toleran, dan hidup dalam semangat gotong royong yang tinggi. Masyarakat juga masih memegang teguh adat istiadat yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Mengutip dari buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha 2019-2023, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 165,60 triliun rupiah. Nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 11,65 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 153,95 triliun rupiah.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Bandung didominasi oleh empat kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Industri Pengolahan;
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;
3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
4. Konstruksi.

Masing-masing lapangan usaha memiliki peranan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencapai 52,91 %. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,46 %, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,77 %, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,04 %, dan peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 %.

Besar kecilnya jumlah penduduk juga mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bandung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,72 juta rupiah. Nominal tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 97,50 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh faktor inflasi.

D. Potensi Daerah

Kabupaten Bandung memiliki Potensi unggulan yang terletak pada 3 (tiga) sektor utama, diantaranya meliputi :

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bandung yang didominasi oleh produk di pertanian tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan, perternakan, perikanan dan perhutanan. Produksi pertanian tanaman pangan meliputi tanaman padi dan palawija. Ketersediaan pangan yang diindikasikan oleh jumlah produksi tanaman pangan mengalami pertumbuhan positif.

Lima komoditas utama sayuran di Kabupaten Bandung adalah kentang, tomat, cabe, bawang merah dan kubis. Kelima komoditas tersebut mengalami peningkatan dalam hal produksi dan produktivitas. Disamping itu, terdapat komoditas- komoditas spesifikasi local dan eksklusif yang dikembangkan

seperti wortel, brokoli dan paprika yang tersebar di Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, rancabali, Cimenyan dan Kertasari.

Selain lima komoditas sayuran diatas, Kabupaten Bandung menjadi daerah penghasil stroberry serta kopi terbesar di Jawa Barat. Penghasil terbesar strobery tersebar di wilayah Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali. Wilayah yang menjadi penghasil kopi di Kabupaten Bandung terdiri dari Kecamatan Cimenyan, Cilengrang, Cicalengka, Nagreg, Ibum, Kertasari, Pangalengan, Cimaung, Pasirjambu, Rancabali, Ciwidey, Pacet, Soreang, Ciparay dan Arjasari.

2. Sektor Pariwisata

Wilayah Kabupaten Bandung dikenal sebagai daerah dengan panorama alam yang indah dan eksotis, menjadi destinasi wisata yang ramai di kunjungi wisatawan. Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Sebagian potensi tersebut dikembangkan menjadi wisata alam dan agro.

a. Kawasan Wisata Alam

Kawasan wisata alam meliputi Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca upas, Ciwalini, Situ Patenggang, Kawah Cibuni, Punceling (Kecamatan Rancabali); Gunung Puntang (Kecamatan Cimaung); Cibolang, Situ Cileunca, Arung Jeram Lalayangan (Kecamatan Pangalengan); Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari); Kawah Kamojang (Kecamatan Ibum); Curug Eti (Kecamatan Paseh); Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah); Oray Tapa, Taman Ir.H.Juanda/TAHURA (Kecamatan Cimenyan); Batukuda, Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang); Jembatan Gantung Rengganis (Kecamatan Rancabali); Nimo Highland (Kecamatan Pangalengan); Wayang Windu Panenjoan (Kecamatan Pangalengan); Bukit Jamur Rancabolang (Kecamatan Pasirjambu); Ecopark Curug Tilu (Kecamatan Rancabali); Glamping Legok Kondang (Kecamatan Ciwidey); Ranca Upas (Kecamatan Ciwidey), D'Riam Riverside (Kecamatan Pasirjambu), Taman Langit Pangalengan (Kecamatan Pangalengan), Hutab Pins Rahong (Kecamatan Pangalengan); Sunrise Point Cukul

(Kecamatan Pangalengan), Pineus Tilu Riverside Camping (Kecamatan Pangalengan), Taman Wisata Bougenville (Kecamatan Banjaran).

b. Kawasan Wisata Budaya

Kawasan wisata budaya meliputi Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey); Rumah Adikondang (Kecamatan Pangalengan); Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Arjasari); Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih); Situs Karang Gantungan (Kecamatan Paseh); Situs Bojong Menje (Kecamatan Rancaekek); Sentra Seni Sunda dan Wayang Golek Jelegong (Kecamatan Baleendah);

c. Kawasan Wisata Agro

- Kawasan Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali
- Kawasan Agrowisata Teh : Perkebunan Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Gambung (Kecamatan Pasirjambu) dan Rancabali (Kecamatan Rancabali)

3. Sektor Industri

Kabupaten Bandung mempunyai industri tekstil yang lokasinya terkonsentrasi di tiga lokasi yaitu sepanjang jalan Cileunyi – Cicalengka - Malajaya, sepanjang jalan Mohamad Toha – Dayeuhkolot – Majalaya dan wilayah Kecamatan Margaasih. Sentra industri tekstil Majalaya memproduksi aneka ragam produk tekstil seperti kain bahan pakaian, pakaian jadi, handuk, benang, tenun, border, kerudung dan yang paling terkenal adalah produksi kain sarung. Untuk meningkatkan perkembangan sektor industri, pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan daerah Kawasan Industri nonpolutif di Kecamatan Margaasih, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan jeruk. Terkait industri tekstil Kabupaten Bandung juga memiliki konveksi sebagai pemasok fashion muslim terbanyak penjualan online yang mana hal ini menarik kunjungan menteri perdagangan ke konveksi fashion muslim/gamis yang terletak di desa Sukanagara Kecamatan Soreang.

Selain industri tekstil Kabupaten Bandung juga memiliki Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) makanan yang dinamakan Gedung Galeri Griya Kriya Bedas (GKB) sebagai pusat promosi, pusat publikasi, dan pusat pemasaran untuk produk-produk IKM makanan oleh-oleh khas Kabupaten Bandung yang sudah terkurasi, tersertifikasi, dan terlegalisasi yang berlokasi di Jalan Gading Tutuka, Soreang.



Gambaran Umum Kabupaten Bandung

Jl. Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Pamekaran,
Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat - 40912

Populasi Penduduk

Jumlah total penduduk Kabupaten Bandung
adalah 3.839.721 jiwa.

Presentasi Penduduk

Penduduk laki laki 1.953.971 jiwa (50,88%) dan
penduduk perempuan 1.885.750 jiwa (49,11%).

Administrasi Pemerintah

Secara administrasi wilayah Kabupaten Bandung
terdiri dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan,
dan 270 desa.

Letak Geografis

Kabupaten Bandung memiliki wilayah daratan
seluas 1.762 km².

Tingkat Kepadatan Penduduk

Kecamatan Baleendah merupakan kecamatan
terpadat. Disusul oleh kecamatan Rancaekek,
Ciparay, Cileunyi, dan Majalaya.

BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

1. Jumlah dan persebaran Penduduk

Kabupaten Bandung adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 3.839.721 jiwa, yang terdiri dari 1.953.971 jiwa laki-laki (50,88%) dan 1.885.750 jiwa perempuan (49,11%). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.723.179 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah penduduk Kabupaten Bandung meningkat sebesar 116.542 jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 3,13% dari tahun sebelumnya.

Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Jumlah penduduk yang besar tentu berkaitan erat dengan berbagai isu dan tantangan dalam pembangunan yang perlu ditangani. Beberapa isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bandung antara lain:

- Resistensi nilai-nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi yang ditandai dengan timbulnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat;
- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima;
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintah;
- Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;

Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

a. Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/ kecamatan/ desa

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut untuk mengetahui berapa banyak jumlah penduduk berjenis kelamin laki – laki dan berapa banyak jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tabel 3.1

memperlihatkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
CILEUNYI	92.277	90.683	182.960
CIMENYAN	57.521	55.622	113.143
CILENGKRANG	28.132	27.302	55.434
BOJONGSOANG	56.533	55.563	112.096
MARGAHAYU	60.789	60.234	121.023
MARGAASIH	78.341	76.113	154.454
KATAPANG	70.393	68.301	138.694
DAYEUKHKOLOT	53.998	52.404	106.402
BANJARAN	72.322	69.711	142.033
PAMEUNGPEUK	48.546	47.069	95.615
PANGALENGAN	85.444	82.514	167.958
ARJASARI	59.616	57.557	117.173
CIMAUNG	48.515	46.868	95.383
CICALENGKA	66.657	64.731	131.388
NAGREG	32.156	30.556	62.712
CIKANCUNG	54.615	51.805	106.420
RANCAEKEK	96.423	95.208	191.631
CIPARAY	94.316	90.704	185.020
PACET	67.409	63.034	130.443
KERTASARI	38.854	37.282	76.136
BALEENDAH	140.920	136.870	277.790
MAJALAYA	87.246	83.004	170.250
SOLOKANJERUK	47.694	45.461	93.155
PASEH	75.541	71.298	146.839
IBUN	49.418	46.997	96.415
SOREANG	62.563	60.648	123.211
PASIRJAMBU	50.434	48.293	98.727
CIWIDEY	47.667	45.402	93.069
RANCABALI	27.811	26.519	54.330
CANGKUANG	44.231	42.696	86.927
KUTAWARINGIN	57.589	55.301	112.890
JUMLAH	1.953.971	1.885.750	3.839.721

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebanyak 50,88% dan penduduk perempuan sebanyak 49,11%. Dari tabel di atas diketahui jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

b. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk adalah hasil bagi jumlah objek terhadap luas daerah. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah satuan/luas daerah, misalnya : luas/m². Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat pemukiman dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan).

Pada tabel 3.2 di bawah memperlihatkan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung bahwa dengan luas 1.762,40km² dihuni oleh 3.839.721 jiwa atau per km² dihuni oleh 2.179 jiwa dan ada kenaikan 66 jiwa per km² dari tahun sebelumnya yang dengan jumlah kepadatan 2.113 jiwa/km².

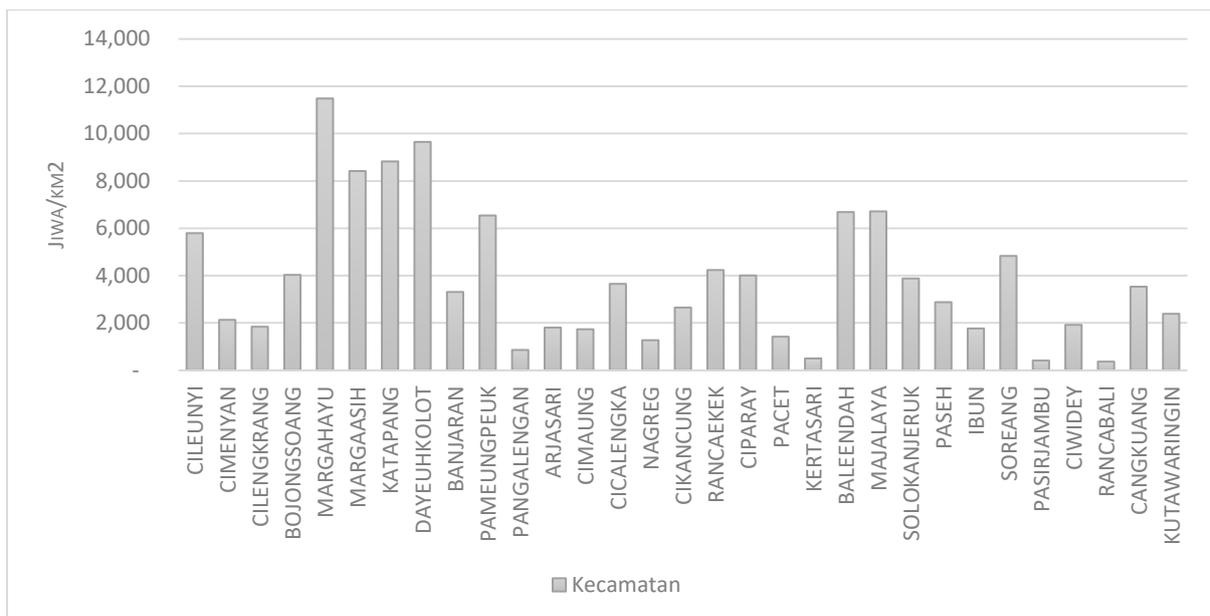
Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk/km ²
1	CILEUNYI	182.960	31,58	5.794
2	CIMENYAN	113.143	53,08	2.132
3	CILENGKRANG	55.434	30,12	1.840
4	BOJONGSOANG	112.096	27,81	4.031
5	MARGAHAYU	121.023	10,54	11.482
6	MARGAASIH	154.454	18,35	8.417
7	KATAPANG	138.694	15,72	8.823
8	DAYEUHKOLOT	106.402	11,03	9.647
9	BANJARAN	142.033	42,92	3.309
10	PAMEUNGPEUK	95.615	14,62	6.540
11	PANGALENGAN	167.958	195,41	860
12	ARJASARI	117.173	64,98	1.803
13	CIMAUNG	95.383	55	1.734
14	CICALENGKA	131.388	35,99	3.651
15	NAGREG	62.712	49,3	1.272
16	CIKANCUNG	106.420	40,14	2.651
17	RANCAEKEK	191.631	45,25	4.235
18	CIPARAY	185.020	46,18	4.006
19	PACET	130.443	91,94	1.419
20	KERTASARI	76.136	152,07	501
21	BALEENDAH	277.790	41,56	6.684
22	MAJALAYA	170.250	25,36	6.713
23	SOLOKANJERUK	93.155	24,01	3.880
24	PASEH	146.839	51,03	2.878
25	IBUN	96.415	54,57	1.767
26	SOREANG	123.211	25,51	4.830
27	PASIRJAMBU	98.727	239,58	412
28	CIWIDEY	93.069	48,47	1.920
29	RANCABALI	54.330	148,37	366
30	CANGKUANG	86.927	24,61	3.532
31	KUTAWARINGIN	112.890	47,3	2.387
JUMLAH		3.839.721	1762,4	2.179

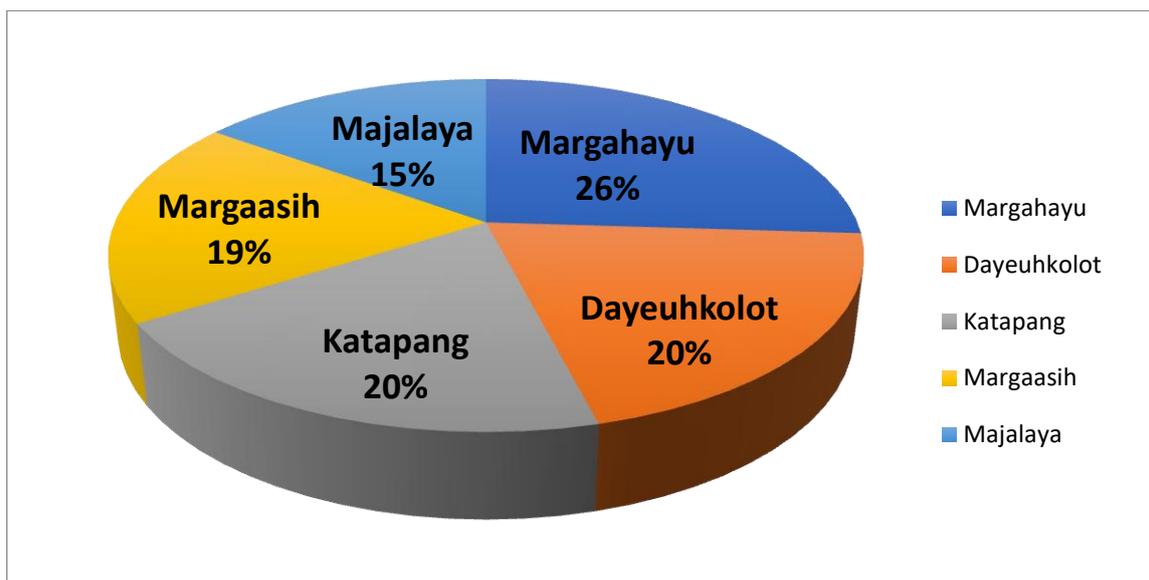
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung

Persebaran penduduk di Kabupaten Bandung apabila dilihat dari setiap kecamatan, kepadatan penduduk didominasi oleh penduduk yang berdomisili di kecamatan Margahayu. Kecamatan Margahayu tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi, yakni 11.482 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Dayeuhkolot dengan 9.647 jiwa/km². Kemudian, kecamatan lainnya yang memiliki kepadatan relatif tinggi antara lain Kecamatan Katapang (8.823 jiwa/km²), Kecamatan Margaasih (8.417 jiwa/km²), dan Kecamatan Majalaya (6.713 jiwa/km²). Sementara itu, Kecamatan Rancabali merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah, hanya sekitar 366 jiwa per km². Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah Rancabali yang mayoritas terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, dan perkebunan, yang cenderung kurang mendukung untuk pemukiman padat. Data lebih lanjut mengenai kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.1 Grafik Kepadatan Penduduk



Gambar 3.2 Diagram Kecamatan Terpadat



c. Laju pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan penduduk secara alami. Pengukuran pertumbuhan penduduk alami ini dapat dilakukan dengan melihat selisih tingkat kelahiran dan kematian dalam satu tahun. Sementara itu, faktor lainnya yaitu migrasi disebut pertumbuhan penduduk non alami. Pertumbuhan penduduk non-alami ini terjadi karena proses imigrasi/emigrasi atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pengukuran pertumbuhan penduduk non-alami dapat dilihat dari selisih penduduk yang melakukan pindah datang dan pindah keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (*masuk/inmigration* dan *keluar/outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk dalam suatu daerah per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk tentunya akan terlihat jika ada perbedaan jumlah penduduk antara tahun yang satu dibandingkan dengan tahun

yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam satu daerah. Demikian juga dengan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari jumlah penduduk dalam beberapa tahun. Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang diawali dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Perhitungan LPP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{2021-2024} = \frac{\left\{ \ln \left(\frac{Pt}{Po} \right) \right\}}{t}$$

Ket :

- r = Angka Pertumbuhan Penduduk
- Po = Jumlah Penduduk tahun 2021
- Pt = Jumlah Penduduk tahun 2024
- t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t
- e = Fungsi eksponensial = 2,7182818

Angka LPP sebesar 1,74 % sebagaimana di atas akan berbeda dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut disebabkan angka yang dihasilkan oleh pihak BPS berawal dari data hasil sensus penduduk menggunakan metode *de facto* (mendata penduduk yang berada di lokasi tempat pendataan terlepas penduduk tersebut memiliki identitas di tempat pendataan ataupun tidak), sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) menghasilkan jumlah penduduk selain secara *de facto* juga secara *de jure* harus tercatat melalui mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (*Civil Registration*) yang diatur dalam Undang–Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang–Undang No.24 tahun 2013.

Angka LPP tersebut boleh jadi kurang mencerminkan angka sebenarnya, namun itulah fakta yang dapat disajikan berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam *database* SIAK. Sehingga idealnya ada kolaborasi metodologi yang dilakukan BPS dan DISDUKCAPIL sehingga dapat menyajikan data yang lebih akurat bagi pemangku kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan (*decision making*) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

2. Penduduk menurut karakteristik demografi

a. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin memiliki peranan penting dalam perencanaan kebijakan serta program pembangunan di suatu wilayah. Hal ini karena setiap kelompok umur memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan dan penanganannya. Karakteristik penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin sangat berguna untuk merancang kebijakan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok umur. Sebagai contoh, kelompok penduduk di bawah usia 5 tahun memerlukan akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi, dan perawatan kesehatan yang optimal, mengingat kelompok ini sangat rentan terhadap kematian. Di sisi lain, kelompok remaja, terutama perempuan, membutuhkan program-program kesehatan reproduksi yang dapat mempersiapkan mereka menjadi calon ibu yang sehat dan prima. Sementara itu, penduduk usia lanjut memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Selain itu, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tidak hanya mencerminkan kondisi demografi masa lalu, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi tren perkembangan penduduk di masa depan melalui proses kelahiran dan kematian. Tabel 3.3 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	%
		JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	0 - 4	142.618	3,71	134.442	3,50%	277.060	7,22
2	5 - 9	172.302	4,49	161.663	4,21%	333.965	8,70
3	10 - 14	180.315	4,70	169.878	4,42%	350.193	9,12
4	15 - 19	155.083	4,04	149.529	3,89%	304.612	7,93
5	20 - 24	175.023	4,56	166.882	4,35%	341.905	8,90
6	25 - 29	160.618	4,18	149.056	3,88%	309.674	8,07
7	30 - 34	146.472	3,81	139.450	3,63%	285.922	7,45
8	35 - 39	131.666	3,43	124.169	3,23%	255.835	6,66
9	40 - 44	149.777	3,90	146.204	3,81%	295.981	7,71
10	45 - 49	136.609	3,56	138.020	3,59%	274.629	7,15
11	50 - 54	117.968	3,07	118.016	3,07%	235.984	6,15
12	55 - 59	94.936	2,47	93.683	2,44%	188.619	4,91
13	60 - 64	71.111	1,85	71.692	1,87%	142.803	3,72
14	65 - 69	50.885	1,33	50.506	1,32%	101.391	2,64
15	70 - 74	35.306	0,92	34.407	0,90%	69.713	1,82
16	>= 75	33.282	0,87	38.153	0,99%	71.435	1,86
JUMLAH		1.953.971	50,89	1.885.750	49,11%	3.839.721	100,00

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Bandung, paling banyak berada di kelompok umur 10 - 14 tahun yaitu sejumlah 350.193 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan sejumlah 4.361 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023. Secara persentase jumlah penduduk dalam rentan usia 10 - 14 mengalami penurunan dari 9,29 % menjadi 9,12 %.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari kelompok usia produktif (15 – 64 Tahun), jumlah penduduk yang masuk kelompok tersebut adalah sejumlah 2.635.964 jiwa (68,65%). Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 2.568.298 jiwa (68,98 %).

a) *Rasio Jenis Kelamin*

Isu mengenai kesetaraan gender menjadi topik yang sering terdengar di beberapa tahun terakhir. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan.

Rasio jenis kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 orang penduduk perempuan. RJK berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan rumah sakit bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan sebagainya. Rasio jenis kelamin ini juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam suatu daerah. Rasio Jenis Kelamin ini dapat melihat perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian suatu daerah dengan rasio yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kebutuhan antara penduduk laki – laki dengan perempuan. Dengan demikian berdasarkan rasio jenis kelamin ini maka penyediaan sarana tergantung kepada berapa banyak rasio jenis kelamin ini.

Tabel 3.4 Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan

KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
CILEUNYI	92.277	90.683	182.960	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
CIMENYAN	57.521	55.622	113.143	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
CILENGKRANG	28.132	27.302	55.434	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
BOJONGSOANG	56.533	55.563	112.096	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
MARGAHAYU	60.789	60.234	121.023	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
MARGAASIH	78.341	76.113	154.454	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
KATAPANG	70.393	68.301	138.694	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
DAYEUKHKOLOT	53.998	52.404	106.402	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
BANJARAN	72.322	69.711	142.033	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
PAMEUNGPEUK	48.546	47.069	95.615	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
PANGALENGAN	85.444	82.514	167.958	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
ARJASARI	59.616	57.557	117.173	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
CIMAUNG	48.515	46.868	95.383	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
CICALENGKA	66.657	64.731	131.388	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
NAGREG	32.156	30.556	62.712	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
CIKANCUNG	54.615	51.805	106.420	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
RANCAEKEK	96.423	95.208	191.631	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
CIPARAY	94.316	90.704	185.020	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
PACET	67.409	63.034	130.443	Dlm 100 Pr ada 107 Lk
KERTASARI	38.854	37.282	76.136	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
BALEENDAH	140.920	136.870	277.790	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
MAJALAYA	87.246	83.004	170.250	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
SOLOKANJERUK	47.694	45.461	93.155	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
PASEH	75.541	71.298	146.839	Dlm 100 Pr ada 106 Lk
IBUN	49.418	46.997	96.415	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
SOREANG	62.563	60.648	123.211	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
PASIRJAMBU	50.434	48.293	98.727	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
CIWIDEY	47.667	45.402	93.069	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
RANCABALI	27.811	26.519	54.330	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
CANGKUANG	44.231	42.696	86.927	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
KUTAWARINGIN	57.589	55.301	112.890	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
JUMLAH	1.953.971	1.885.750	3.839.721	Dlm 100 Pr ada 104 Lk

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bandung sebesar 104 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 laki-laki. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Rasio penduduk ini tidak berubah karena pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung relatif sama antara pertumbuhan penduduk jenis kelamin laki-laki dengan perempuan.

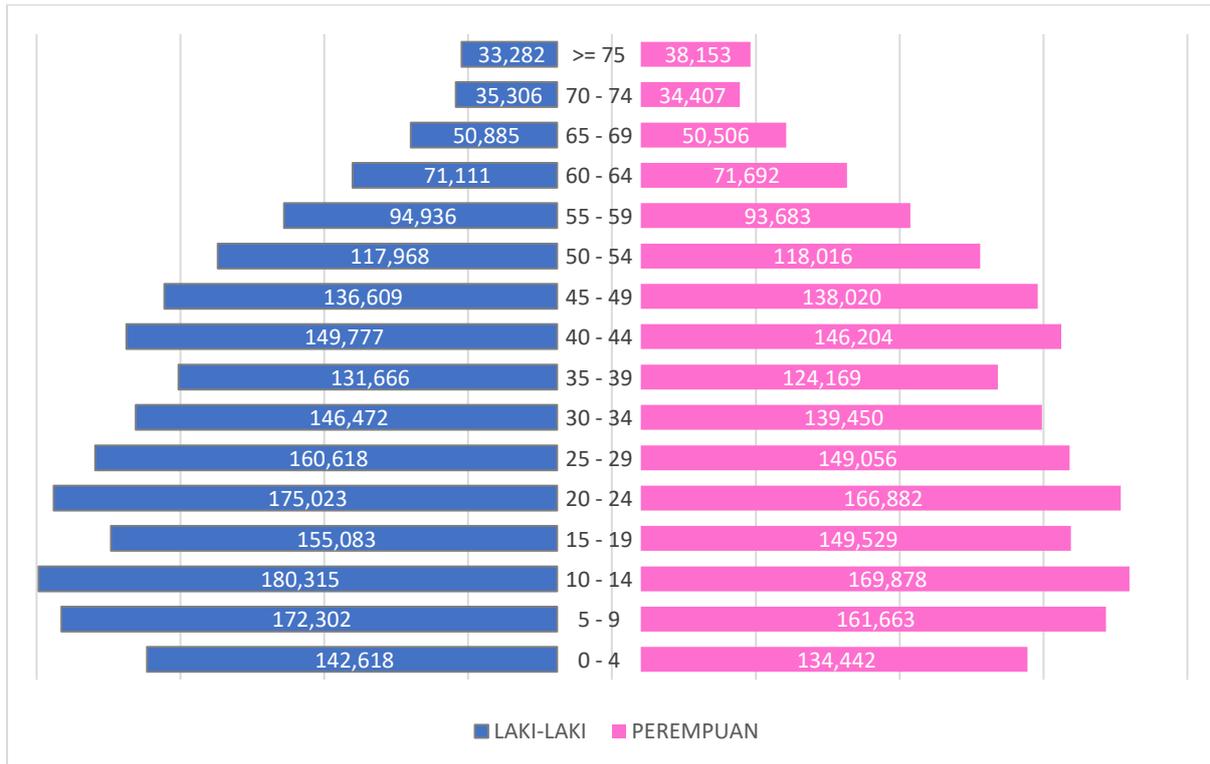
Rasio jenis kelamin penduduk paling mencolok terdapat di Kecamatan Pacet sebesar 107 dan Paseh sebesar 106 yang dapat diartikan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 106-107 penduduk berjenis kelamin laki – laki. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa di semua daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan.

b) Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Diagram ini terdiri dari dua batang vertikal yang saling berlawanan, dengan satu sisi mewakili jumlah penduduk laki-laki dan sisi lainnya mewakili jumlah penduduk perempuan. Setiap batang menggambarkan jumlah penduduk dalam kelompok usia lima tahunan. Grafik ini dapat menunjukkan baik jumlah penduduk pada usia dan jenis kelamin tertentu, maupun persentase penduduk tersebut terhadap total populasi di wilayah tersebut

Piramida penduduk Kabupaten Bandung dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan adanya jumlah penduduk yang lebih banyak di kelompok usia 10–14 tahun, pemerintah perlu merencanakan penyediaan lapangan pekerjaan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, mengingat kelompok ini akan memasuki usia produktif. Selain itu, piramida penduduk juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum, terutama mengingat pada tahun 2024 akan dilaksanakan PILKADA serentak. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, banyak pemilih pemula yang perlu diberikan sosialisasi tentang demokrasi. Gambar 3.3 menunjukkan piramida penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2024.

Gambar 3.3 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung



Berdasarkan bentuk piramida penduduk di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung masih didominasi oleh penduduk usia muda. Secara khusus, kelompok usia 10–14 tahun menempati posisi tertinggi dengan persentase 9,12%, atau sekitar 350.193 jiwa. Kelompok usia 0–4 tahun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan angka kelahiran pada tahun 2024. Hal yang perlu diperhatikan adalah kelompok usia sekolah menengah, yaitu 10–14 tahun dan 15–19 tahun, yang menjadi aset penting bagi Kabupaten Bandung dalam menghadapi tantangan pembangunan 5 hingga 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang komprehensif antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, agar kelompok ini tidak menjadi beban pembangunan di masa depan.

c) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio / DR*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan

keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3.5 Pengelompokan Usia Muda, Usia Produktif dan Usia Tua

KECAMATAN	JUMLAH USIA MUDA	JUMLAH USIA PRODUKTIF	JUMLAH USIA TUA
CILEUNYI	43.259	129.122	10.579
CIMENYAN	25.776	79.042	8.325
CILENGKRANG	13.239	38.734	3.461
BOJONGSOANG	26.365	79.479	6.252
MARGAHAYU	26.689	85.279	9.055
MARGAASIH	38.924	107.208	8.322
KATAPANG	34.229	96.807	7.658
DAYEUHKOLOT	24.251	75.131	7.020
BANJARAN	35.195	97.498	9.340
PAMEUNGPEUK	24.646	65.362	5.607
PANGALENGAN	42.434	112.540	12.984
ARJASARI	30.409	79.449	7.315
CIMAUNG	23.685	64.537	7.161
CICALENGKA	33.160	90.409	7.819
NAGREG	16.331	42.679	3.702
CIKANCUNG	29.501	70.991	5.928
RANCAEKEK	46.664	132.880	12.087
CIPARAY	46.829	126.281	11.910
PACET	36.606	86.126	7.711
KERTASARI	19.316	51.605	5.215
BALEENDAH	69.939	192.308	15.543
MAJALAYA	42.477	116.848	10.925
SOLOKANJERUK	23.505	63.712	5.938
PASEH	39.843	98.523	8.473
IBUN	25.687	64.934	5.794
SOREANG	29.962	85.241	8.008
PASIRJAMBU	24.561	67.064	7.102
CIWIDEY	23.320	62.621	7.128
RANCABALI	13.096	37.167	4.067
CANGKUANG	21.893	59.810	5.224
KUTAWARINGIN	29.427	76.577	6.886
JUMLAH	961.218	2.635.964	242.539

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Tabel di atas menggambarkan komposisi penduduk produktif dan non produktif sebagai dasar perhitungan DR Kabupaten Bandung, yang apabila dimasukkan pada formula di bawah ini

$$DR = \frac{\text{Penduduk Usia Muda} + \text{Penduduk Usia Tua}}{\text{Usia Produktif}} \times 100 \%$$

Maka berikut ini adalah angka DR Kabupaten Bandung 2024 :

$$DR = \frac{961.218 + 242.539}{2.635.964} \times 100 \% = 45,66\%$$

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia 65 tahun ke atas juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-65 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Rasio ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100. Rasio ketergantungan Kabupaten Bandung secara umum sebesar 45,66% artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif Kabupaten Bandung menanggung ± 46 orang usia non produktif baik anak – anak maupun manula. Angka ini terbilang cukup rendah karena masih di bawah 50 jiwa. Usia penduduk tua (>=65 tahun) secara persentase terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung kecil hanya (6,32 %).

Angka DR pada tahun 2024 sebesar 45,66% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebelumnya di angka 44,97 %. Hal ini berarti beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi semakin bertambah. Kondisi ini terjadi karena semakin bertambahnya jumlah penduduk non produktif.

b. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin

Pada tabel di bawah terlihat bahwa Kabupaten Bandung pada umumnya didominasi oleh penduduk yang sudah kawin 49,77 %, sedangkan penduduk belum kawin mencapai 44,54 % dari jumlah penduduk 3.839.721 jiwa.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
0 - 4	277.013	45	0	2
5 - 9	333.962	3	0	0
10 - 14	350.192	1	0	0
15 - 19	300.930	3.670	11	1
20 - 24	254.307	86.327	1.142	129
25 - 29	103.410	200.963	4.738	563
30 - 34	39.675	237.782	7.189	1.276
35 - 39	19.505	226.368	7.592	2.370
40 - 44	13.631	267.328	9.840	5.182
45 - 49	7.867	247.649	9.972	9.141
50 - 54	4.569	208.902	8.875	13.638
55 - 59	2.615	160.032	6.956	19.016
60 - 64	1.424	114.160	4.986	22.233
65 - 69	738	74.545	3.258	22.850
70 - 74	377	46.390	2.107	20.839
>= 75	371	37.138	2.542	31.384
JUMLAH	1.710.586	1.911.303	69.208	148.624

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Penduduk dengan status kawin berjumlah 1.911.303 jiwa atau 49,77 %, status cerai hidup berjumlah 69.208 jiwa atau 1,80 %, status cerai mati berjumlah 148.624 jiwa atau 3,87 % dan penduduk yang berstatus belum kawin sejumlah 1.710.586 jiwa atau 44,54 %.

Penduduk yang mempunyai status cerai mati sebanyak 148.624 jiwa. Penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan status cerai mati paling banyak pada kelompok usia di atas 75 tahun. Sementara dilihat dari produktivitas kelompok umur yang sudah tidak produktif (≥ 65 tahun) paling banyak mempunyai status kawin dan cerai mati. Hal ini dikarenakan pada usia di atas 65 tahun sudah banyak pasangan yang ditinggalkan mati. Perbedaan harapan hidup antara perempuan dan laki – laki menjadikan banyak kelompok umur di atas 65 tahun hidup sendiri.

Penduduk yang mempunyai status cerai hidup paling banyak pada kelompok 45 – 49 Tahun. Kelompok umur ini merupakan kelompok umur mapan baik secara psikologis maupun ekonomi, sehingga menjadikan penduduk lebih mandiri. Kemandirian inilah menyebabkan ketergantungan kepada pasangan menjadi lebih

kecil. Akibatnya hubungan di antara pasangan menjadi lebih renggang dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Status Kawin

KECAMATAN	STATUS KAWIN			
	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
CILEUNYI	83.848	88.793	3.561	6.758
CIMENYAN	49.200	57.118	2.584	4.241
CILENGKRANG	24.183	28.160	1.099	1.992
BOJONGSOANG	50.338	55.519	2.421	3.818
MARGAHAYU	55.352	58.299	2.455	4.917
MARGAASIH	71.344	75.210	2.515	5.385
KATAPANG	62.530	68.119	3.056	4.989
DAYEUKHKOLOT	47.971	52.046	2.287	4.098
BANJARAN	62.819	70.557	3.000	5.657
PAMEUNGPEUK	42.998	47.097	1.890	3.630
PANGALENGAN	69.965	88.906	2.239	6.848
ARJASARI	51.290	59.619	2.311	3.953
CIMAUNG	39.577	50.368	1.564	3.874
CICALENGKA	60.856	62.743	2.179	5.610
NAGREG	28.845	30.292	944	2.631
CIKANCUNG	49.355	52.011	1.439	3.615
RANCAEKEK	86.443	93.979	3.450	7.759
CIPARAY	83.671	90.744	3.217	7.388
PACET	59.549	64.444	1.505	4.945
KERTASARI	31.974	39.745	962	3.455
BALEENDAH	127.283	135.189	4.968	10.350
MAJALAYA	76.510	83.350	2.822	7568
SOLOKANJERUK	40.697	47.219	1.413	3.826
PASEH	67.002	71.767	2.243	5.827
IBUN	42.312	48.647	1.766	3.690
SOREANG	54.283	61.134	2.935	4.859
PASIRJAMBU	41.967	50.886	1.866	4.008
CIWIDEY	39.027	48.405	1.772	3.865
RANCABALI	22.051	29.301	944	2.034
CANGKUANG	38.290	43.868	1.641	3.128
KUTAWARINGIN	49.056	57.768	2.160	3.906
JUMLAH	1.710.586	1.911.303	69.208	148.624

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

c. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau ibu dan anak, atau ayah dan anak. Keluarga terbentuk dari sekelompok individu yang saling terhubung melalui hubungan kekerabatan yang muncul dari perkawinan, kelahiran, adopsi, dan sebagainya. Secara umum, keluarga dibagi menjadi dua jenis: keluarga inti (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sementara keluarga luas mencakup hubungan kekerabatan yang lebih jauh, seperti paman, bibi, serta keluarga dari pihak kakek dan nenek. Unit keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai intervensi sosial, seperti penanggulangan kemiskinan, program keluarga berencana, dan inisiatif lainnya.

Jumlah keluarga yang besar juga mencerminkan tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Hal ini menjadi perhatian penting karena seiring berjalannya waktu, penduduk yang terus berkembang memerlukan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan akan sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perencanaan yang matang untuk penyediaan infrastruktur dan layanan dasar sangat diperlukan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk secara pesat harus diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang baik. Besarnya jumlah keluarga juga menginformasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah itu tinggi, sehingga pembangunan sarana dan prasarana kesehatan pun harus semakin ditingkatkan.

a) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Tabel 3.8 Jumlah Kepala Keluarga

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	CILEUNYI	58.467
2	CIMENYAN	37.918
3	CILENGKRANG	18.299
4	BOJONGSOANG	36.370
5	MARGAHAYU	39.304
6	MARGAASIH	49.277
7	KATAPANG	45.107
8	DAYEUEHKOLOTT	35.596
9	BANJARAN	47.938

10	PAMEUNGPEUK	31.536
11	PANGALENGAN	58.648
12	ARJASARI	39.015
13	CIMAUNG	33.345
14	CICALENGKA	42.416
15	NAGREG	20.271
16	CIKANCUNG	33.713
17	RANCAEKEK	62.543
18	CIPARAY	61.392
19	PACET	42.162
20	KERTASARI	25.939
21	BALEENDAH	89.446
22	MAJALAYA	56.436
23	SOLOKANJERUK	31.549
24	PASEH	46.954
25	IBUN	31.430
26	SOREANG	41.149
27	PASIRJAMBU	34.209
28	CIWIDEY	32.812
29	RANCABALI	19.412
30	CANGKUANG	28.803
31	KUTAWARINGIN	37.053
JUMLAH		1.268.509

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam suatu keluarga, dimana diasumsikan bahwa semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{AK} = \frac{\Sigma Pddk}{\Sigma KK} \times 100$$

\bar{AK} = Rata-rata jumlah anggota keluarga

$\Sigma Pddk$ = Jumlah penduduk

ΣKK = Jumlah Kepala Keluarga

Maka berikut ini adalah rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bandung tahun 2024 :

Tabel 3.9 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
1	CILEUNYI	182.960	58.467	3,13
2	CIMENYAN	113.143	37.918	2,98
3	CILENGKRANG	55.434	18.299	3,03
4	BOJONGSOANG	112.096	36.370	3,08
5	MARGAHAYU	121.023	39.304	3,08
6	MARGAASIH	154.454	49.277	3,13
7	KATAPANG	138.694	45.107	3,07
8	DAYEUHKOLOT	106.402	35.596	2,99
9	BANJARAN	142.033	47.938	2,96
10	PAMEUNGPEUK	95.615	31.536	3,03
11	PANGALENGAN	167.958	58.648	2,86
12	ARJASARI	117.173	39.015	3,00
13	CIMAUNG	95.383	33.345	2,86
14	CICALENGKA	131.388	42.416	3,10
15	NAGREG	62.712	20.271	3,09
16	CIKANCUNG	106.420	33.713	3,16
17	RANCAEKEK	191.631	62.543	3,06
18	CIPARAY	185.020	61.392	3,01
19	PACET	130.443	42.162	3,09
20	KERTASARI	76.136	25.939	2,94
21	BALEENDAH	277.790	89.446	3,11
22	MAJALAYA	170.250	56.436	3,02
23	SOLOKANJERUK	93.155	31.549	2,95
24	PASEH	146.839	46.954	3,13
25	IBUN	96.415	31.430	3,07
26	SOREANG	123.211	41.149	2,99
27	PASIRJAMBU	98.727	34.209	2,89
28	CIWIDEY	93.069	32.812	2,84
29	RANCABALI	54.330	19.412	2,80
30	CANGKUANG	86.927	28.803	3,02
31	KUTAWARINGIN	112.890	37.053	3,05
JUMLAH		3.839.721	1.268.509	3,03

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bandung tahun 2024 sebesar 3,03. Artinya bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bandung adalah 3 orang, dan ini merupakan keluarga inti.

b) Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal Bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, dan menantu, termasuk adanya orang lain yang tinggal Bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel 3.10 Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan Kepala Keluarga	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kepala Keluarga	1.030.761	52,752	237.748	12,608	1.268.509	33,0365
Suami	24	0,001	0	0,000	24	0,0006
Istri	0	0,000	880.918	46,714	880.918	22,9422
Anak	893.544	45,730	738.016	39,136	1.631.560	42,4916
Menantu	56	0,003	63	0,003	119	0,0031
Cucu	11.063	0,566	8.401	0,445	19.464	0,5069
Orang Tua	559	0,029	3.776	0,200	4.335	0,1129
Mertua	480	0,025	2.717	0,144	3.197	0,0833
Famili Lain	13.196	0,675	10.174	0,540	23.370	0,6086
Pembantu	20	0,001	49	0,003	69	0,0018
Lainnya	4.268	0,218	3.888	0,206	8.156	0,2124
Jumlah	1.953.971	100	1.885.750	100	3.839.721	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Tabel ini menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak. Pada table di atas terlihat bahwa Kepala Keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, yakni 1.030.761 Kepala Keluarga laki-laki terdapat 880.918 isteri tetapi dari 237.748 Kepala Keluarga perempuan, hanya 24 jiwa saja yang bersuami.

c) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 3.11 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Usia

Kelompok Umur	Kepala Keluarga	
	Σ	%
10 - 14	55	0,0043
15 - 19	2.052	0,1618
20 - 24	34.756	2,74
25 - 29	100.111	7,8922
30 - 34	130.042	10,252
35 - 39	130.980	10,326
40 - 44	159.230	12,553
45 - 49	154.995	12,219
50 - 54	141.195	11,131
55 - 59	121.588	9,5853
60 - 64	98.743	7,7843
65 - 69	76.315	6,0162
70 - 74	56.668	4,4674
≥ 75	61.752	4,8682
JUMLAH	1.268.482	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Tabel berikut menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah 159.230. Yang menarik adalah adanya Kepala Keluarga pada kelompok umur 10-14 tahun, walaupun persentasenya kecil tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bandung. Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 4,86%, hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk Kabupaten Bandung.

d) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Tabel 3.12 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	
CILEUNYI	47.648	81,50	10.819	18,50	58.467
CIMENYAN	30.862	81,39	7.056	18,61	37.918
CILENGKRANG	15.047	82,23	3.252	17,77	18.299
BOJONGSOANG	29.877	82,15	6.493	17,85	36.370
MARGAHAYU	31.414	79,93	7.890	20,07	39.304
MARGAASIH	40.304	81,79	8.973	18,21	49.277
KATAPANG	36.906	81,82	8.201	18,18	45.107
DAYEUKHKOLOT	28.503	80,07	7.093	19,93	35.596
BANJARAN	38.556	80,43	9.382	19,57	47.938
PAMEUNGPEUK	25.536	80,97	6.000	19,03	31.536
PANGALENGAN	47.299	80,65	11.349	19,35	58.648
ARJASARI	31.915	81,80	7.100	18,20	39.015
CIMAUNG	27.053	81,13	6.292	18,87	33.345
CICALENGKA	33.974	80,10	8.442	19,90	42.416
NAGREG	16.538	81,58	3.733	18,42	20.271
CIKANCUNG	27.609	81,89	6.104	18,11	33.713
RANCAEKEK	50.690	81,05	11.853	18,95	62.543
CIPARAY	49.387	80,45	12.005	19,55	61.392
PACET	34.489	81,80	7.673	18,20	42.162
KERTASARI	21.087	81,29	4.852	18,71	25.939
BALEENDAH	72.787	81,38	16.659	18,62	89.446
MAJALAYA	45.765	81,09	10.671	18,91	56.436
SOLOKANJERUK	25.663	81,34	5.886	18,66	31.549
PASEH	38.726	82,48	8.228	17,52	46.954
IBUN	26.182	83,30	5.248	16,70	31.430
SOREANG	33.284	80,89	7.865	19,11	41.149
PASIRJAMBU	27.489	80,36	6.720	19,64	34.209
CIWIDEY	26.119	79,60	6.693	20,40	32.812
RANCABALI	15.776	81,27	3.636	18,73	19.412
CANGKUANG	23.633	82,05	5.170	17,95	28.803
KUTAWARINGIN	30.643	82,70	6.410	17,30	37.053
JUMLAH	1.030.761	81,26	237.748	18,74	1.268.509

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 81,26% keluarga yang dikepalai laki-laki dan 18,74% keluarga yang dikepalai perempuan. Dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh perempuan diduga menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi (cerai hidup maupun mati) dan juga gaya hidup modern yaitu karena kemandirian perempuan yang berani untuk hidup sendiri.

e) *Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Kawin*

Dalam konsep demografi, kepala keluarga adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat berstatus menikah atau tidak, dan memiliki peran, fungsi, serta tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah keluarga yang dipimpin oleh individu yang belum menikah, maupun oleh mereka yang berstatus cerai, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Tabel 3.13 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin

Status Kawin	Kepala Keluarga	
	Σ	%
Belum Kawin	39.481	3,11
Kawin	1.022.091	80,57
Cerai Mati	141.845	11,18
Cerai Hidup	65.092	5,13
Jumlah	1.268.509	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Dari tabel ini, terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 berstatus kawin yakni 80,57%, dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 3,11%, selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 16,31%.

f) *Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan*

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 3.14 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan

Pendidikan	Kepala Keluarga	
	Σ	%
TIDAK/BLM SEKOLAH	4.626	0,36
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	9.172	0,72
TAMAT SD/SEDERAJAT	466.534	36,78
SLTP/SEDERAJAT	283.524	22,35
SLTA/SEDERAJAT	394.963	31,14
DIPLOMA I/II	7.759	0,61
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	24.096	1,90
DIPLOMA IV/STRATA I	70.354	5,55
STRATA-II	6.600	0,52
STRATA-III	881	0,07
Jumlah	1.268.509	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Keluarga berpendidikan tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 36,78%, disusul dengan SLTA/Sederajat sebesar 31,14%, dan SLTP/Sederajat sebesar 22,35%. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,51% dan S1/S2/S3 sebesar 6,14%. Kepala keluarga yang tidak sekolah persentasenya mencapai 0,36%. Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka Kepala Keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya.

g) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dianalisis melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga, serta kontribusi mereka terhadap perekonomian keluarga. Oleh karena itu, informasi mengenai status pekerjaan kepala keluarga sangat penting untuk perencanaan dalam menyediakan pelayanan kebutuhan dasar bagi penduduk.

Tabel 3.15 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status Bekerja	Kepala Keluarga	
	Σ	%
BEKERJA	2.299.077	90,62
BELUM/TIDAK BEKERJA	24.620	0,97
PELAJAR/MAHASISWA	9.688	0,38
PENSIUNAN	20.997	0,83
MENGURUS RUMAH TANGGA	182.636	7,20
JUMLAH	2.537.018	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Dilihat dari kegiatan ekonomi, bahwa sekitar 90,62% kepala keluarga di Kabupaten Bandung bekerja. Sekitar 0,97% kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bandung berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase mereka kecil, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

d. Penduduk menurut karakteristik sosial

a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas penduduk. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena meskipun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, tanpa diimbangi dengan kualitas yang memadai, akan berdampak negatif. Terlebih lagi, dalam menghadapi era globalisasi, persaingan untuk mendapatkan kesempatan kerja semakin ketat. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan sangat penting, mengingat banyak peluang kerja yang membutuhkan tenaga terdidik dengan keterampilan khusus. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bandung :

Tabel 3.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
	L	%	P	%	
Tidak/Belum Sekolah	395.815	10,31	369.712	9,63	765.527
Belum Tamat SD	197.149	5,13	179.712	4,68	376.861
Tamat SD Sederajat	431.745	11,24	471.346	12,28	903.091
SMP/Sederajat	351.844	9,16	360.667	9,39	712.511
SMA/Sederajat	469.891	12,24	395.378	10,30	865.269
Diploma I/II/Sederajat	6.805	0,18	8.440	0,22	15.245
Diploma III/Sederajat	22.682	0,59	27.093	0,71	49.775
Diploma IV/S1	70.976	1,85	69.048	1,80	140.024
S2	6.244	0,16	3.966	0,10	10.210
S3	820	0,02	388	0,01	1.208
JUMLAH	1.953.971	50,89	1.885.750	49,11	3.839.721

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan terakhir sesuai dengan tabel 3.13 hasil dari konsolidasi kemendagri semester II tahun 2024. Penduduk di Kabupaten Bandung dapat dikatakan masih berpendidikan rendah yaitu mayoritas setingkat SMP/Sederajat kebawah sebesar 71,79 %, setelahnya kedua terbanyak penduduk berpendidikan SMA/Sederajat sebesar 22,54 % , sedangkan penduduk yang berpendidikan tinggi sebesar 5,64 %. Komposisi tingkat pendidikan setingkat SMP/Sederajat kebawah mengalami kenaikan sebesar 2,03 %, SMA/Sederajat mengalami kenaikan sebesar 4,67 %, dan tingkat penduduk yang berpendidikan tinggi mengalami kenaikan sebesar 5,50 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.17 Kelompok Usia berdasarkan Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN TERAKHIR	USIA		
	0 - 14	15 - 64	>= 65
Tidak/Belum Sekolah	716.612	46.916	1.999
Belum Tamat SD/Sederajat	218.747	153.862	4.252
Tamat SD/Sederajat	25.859	711.905	165.327
SMP/Sederajat	0	683.751	28.760
SMA/Sederajat	0	834.571	30.698
Diploma I/II	0	14.202	1043
Akademi/Diploma III	0	46.471	3.304
Diploma IV/Sastra I	0	133.939	6.085
Sastra - II	0	9.333	877
Sastra - III	0	1014	194
JUMLAH	961.218	2.635.964	242.539

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental dan sangat penting dalam masyarakat. Namun, kebebasan beragama harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari penganutnya untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing, serta menjaga agar tidak menambah atau mengurangi kaidah-keidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianut.

Kebebasan seseorang dalam beragama yang tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukanlah hal yang mudah. Pada titik ini, peraturan hukum harus dijelaskan dengan tegas dan jelas. Hukum harus berfungsi sebagai penengah yang adil antara kebebasan individu atau kelompok satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kebebasan beragama merupakan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus dipahami secara mendalam oleh negara maupun masyarakat, beserta makna dan konsekuensinya. Sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan, data penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

AGAMA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI - LAKI	%	PEREMPUAN	%		
ISLAM	1.916.422	49,9104	1.848.010	48,1288	3.764.432	98,0392
KRISTEN	26.263	0,6840	26.404	0,6877	52.667	1,3716
KATHOLIK	9.037	0,2354	9.151	0,2383	18.188	0,4737
HINDU	287	0,0075	278	0,0072	565	0,0147
BUDHA	1.632	0,0425	1.642	0,0428	3.274	0,0853
KONGHUCU	52	0,0014	46	0,0012	98	0,0026
KEPERCAYAAN	278	0,0072	219	0,0057	497	0,0129
JUMLAH	1.953.971	50,8884	1.885.750	49,1116	3.839.721	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa penduduk Kabupaten Bandung didominasi penduduk beragama Islam. Penduduk Kabupaten Bandung didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, dalam tahun 2024 komposisi penduduk Kabupaten Bandung yang beragama Islam sebesar 98,03% atau sebanyak 3.764.432 jiwa.

c) Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merujuk pada setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, yang dapat menyebabkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan prinsip kesamaan hak. Disabilitas dibagi menjadi enam kategori, yaitu:

- Cacat Fisik : Menyatakan jenis disabilitas dengan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- Cacat Fisik dan Mental : Menyatakan jenis disabilitas dengan cacat fisik dan cacat mental
- Cacat Mental : Menyatakan jenis disabilitas dengan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku
- Cacat Netra : Menyatakan jenis disabilitas dengan cacat buta
- Cacat Rungu : Menyatakan jenis disabilitas dengan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- Cacat Lainnya : Menyatakan jenis disabilitas dengan cacat selain yang disebutkan diatas.

Sebagai warga negara, penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dalam mendapatkan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan publik. Unit layanan publik atau instansi terkait pelaksana layanan publik perlu menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang disabilitas dan jenis kedisabilitasannya sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan publik yang ramah terhadap disabilitas. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk disabilitas berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Disabilitas berdasarkan Jenis Kelamin

NO	DISABILITAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	FISIK	470	248	718	17,32
2	NETRA	140	144	284	6,85
3	RUNGU	327	265	592	14,28
4	MENTAL	1.284	754	2.038	49,16
5	FISIK DAN MENTAL	46	42	88	2,12
6	LAINNYA	239	187	426	10,27
JUMLAH		2.506	1.640	4.146	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Penduduk dengan disabilitas di Kabupaten Bandung sebesar 0,10 % dari seluruh penduduk sebanyak 3.839.721 jiwa. Persentase penduduk yang mengalami Disabilitas di Kabupaten Bandung tahun 2024 menurun 0,01 % dari tahun 2023. Disabilitas yang paling banyak dialami oleh penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2024 adalah disabilitas mental sebesar 49,16 %. Persentase tersebut mengalami penurunan 2,35 % dibanding tahun sebelumnya yaitu 51,51 %. Disabilitas fisik dan mental menjadi komposisi disabilitas terendah yaitu sekitar 2,12 % dari jumlah keseluruhan disabilitas di Kabupaten Bandung.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya penduduk dengan disabilitas antara lain disabilitas yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti korban peperangan, kerusakan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, serta kecelakaan lainnya. Selain itu, disabilitas juga dapat terjadi sejak lahir atau ketika masih dalam kandungan, termasuk yang disebabkan oleh penyakit keturunan. Penyakit tertentu, seperti polio, penyakit kelamin, TBC, kusta, diabetes, dan penyakit bawaan lainnya, juga dapat menjadi penyebab disabilitas pada seseorang.

Meskipun jumlahnya relatif kecil, penyandang disabilitas tetap harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini penting karena mereka membutuhkan perlakuan khusus untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan pelayanan yang layak dan kesempatan yang setara. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas harus tersedia di semua layanan publik, agar mereka tidak terpinggirkan. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan data yang akurat

mengenai penyandang disabilitas, guna merencanakan dan mengembangkan pelayanan yang lebih baik bagi mereka, yang termasuk dalam kategori kebutuhan khusus.

d) *Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah*

Darah merupakan komponen penting dalam tubuh, sehingga setiap individu perlu mengetahui golongan darahnya. Pengetahuan tentang golongan darah sangat krusial, karena informasi ini dapat sangat membantu dalam situasi darurat, seperti saat membutuhkan transfusi darah. Pencantuman golongan darah pada dokumen KTP elektronik akan mempermudah akses informasi tersebut. Mengingat tidak ada yang bisa memprediksi kapan musibah atau kebutuhan transfusi darah terjadi, memiliki data golongan darah yang jelas sangatlah penting.

Pelayanan pendaftaran penduduk melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) mewajibkan setiap data biodata yang dimasukkan untuk mencantumkan golongan darah. Namun, sayangnya masih banyak penduduk yang mengabaikan hal ini dengan alasan tidak pernah memeriksa golongan darah mereka. Data mengenai golongan darah penduduk di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

No.	Gol. Darah	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	A	65.525	64.801	130.326	3,394
2	B	47.439	49.801	97.240	2,532
3	AB	28.385	26.409	54.794	1,427
4	O	94.358	84.138	178.496	4,649
5	A+	1.566	1.759	3.325	0,087
6	A-	146	160	306	0,008
7	B+	1075	1.273	2.348	0,061
8	B-	123	110	233	0,006
9	AB+	611	700	1.311	0,034
10	AB-	367	331	698	0,018
11	O+	1.254	1.354	2.608	0,068
12	O-	2.842	2.488	5.330	0,139
13	Tidak Tahu	1.710.280	1.652.426	3.362.706	87,577
Jumlah		1.953.971	1.885.750	3.839.721	100

Sumber : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat masih banyak penduduk yang tidak mengetahui golongan darahnya. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk yang tidak mengetahui golongan darah yaitu 87,57%. Persentase penduduk yang tidak mengetahui golongan darah mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu 87,68 %. Penduduk tidak pernah melakukan pemeriksaan akan golongan darahnya karena kurangnya pemahaman penduduk terkait pentingnya mengetahui golongan darah dan hanya melakukan pemeriksaan saat mengalami penyakit/kondisi yang kritis saat membutuhkan donor darah.

Mengetahui golongan darah sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan medis yang perlu diambil, terutama jika seseorang membutuhkan tindakan lanjutan yang terkait dengan transfusi darah. Selain itu, jika informasi ini tersedia bagi sektor kesehatan, proses transfusi darah dan pengelolaan persediaan darah di bank darah, seperti yang dikelola oleh PMI di Kabupaten Bandung, akan menjadi lebih efisien dan terorganisir dengan baik.

B. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk mencerminkan kondisi penduduk dari aspek fisik maupun non-fisik, yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, serta kecerdasan. Kualitas ini menjadi ukuran dasar dalam mengembangkan kemampuan individu dan memastikan mereka dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Hal ini mencakup kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, mencintai kebangsaan, dan hidup dengan layak.

1. Indikator Kesehatan

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang mencakup tiga komponen utama: indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup saat lahir). Dalam merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, data yang relevan sangat diperlukan, antara lain: Angka Kelahiran Kasar, Rasio Anak dan Perempuan, Angka Kematian Bayi dan Balita, serta Angka Kematian Ibu. Data ini menjadi dasar penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

a. Kelahiran

a) Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah indikator yang menunjukkan jumlah kelahiran dalam suatu tahun per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka ini juga mencerminkan tingkat kelahiran hidup di suatu daerah, dan dapat dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam sektor kesehatan. CBR berkaitan erat dengan kondisi kesehatan ibu dan bayi saat kelahiran, di mana semakin baik kesehatan tersebut, semakin besar kemungkinan bayi lahir hidup. Angka kelahiran hidup per 1.000 penduduk ini juga memberikan gambaran penting bagi perencanaan pembangunan, khususnya dalam hal penyediaan sarana kesehatan yang memadai untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir.

Berdasarkan data angka kelahiran dari Dinas Kesehatan tahun 2023 bahwa angka kelahiran berjumlah 55.580 jiwa, dengan rincian 30.850 jiwa kelahiran hidup laki-laki dan 24.730 jiwa kelahiran hidup perempuan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 60.096 jiwa. Berikut adalah rumus menghitung Angka Kelahiran Kasar (CBR) :

$$CBR = \frac{B}{P} \times 1.000$$

CBR = Angka Kelahiran Kasar

B = Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu $\{(P_o + P_t)/2\}$

P_o = Jumlah penduduk pada awal tahun

P_t = Jumlah penduduk pada akhir tahun

$$CBR = \frac{55.580}{(3.773.104 + 3.839.721)/2} \times 1.000 = 14,6$$

Dari hasil perhitungan CBR terlihat bahwa angka kelahiran kasar Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar 14,6 artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun 2024 terjadi sekitar 15 kelahiran hidup.

b) *Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR)*

Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat natalitas atau kelahiran di suatu wilayah. Angka ini digunakan untuk membandingkan keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi, serta untuk menilai efektivitas program keluarga berencana (KB). GFR juga membantu perencana pembangunan dalam merancang kebijakan, seperti meningkatkan usia kawin rata-rata, memperbaiki pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak, serta mengembangkan program untuk menurunkan tingkat kelahiran.

Angka Kelahiran Umum (GFR) dihitung berdasarkan jumlah kelahiran yang terjadi per 1.000 wanita berusia 15-49 tahun. Berikut adalah rumus untuk menghitungnya:

$$GFR = \frac{B}{Pf_{15-49}} \times 1000$$

Dimana :
B / Jumlah Kelahiran = 55.580
Pf / Jumlah Perempuan Usia 15-49
= 1.013.310
1000 = Konstanta

Sehingga Angka Kelahiran Umum (GFR) Kabupaten Bandung pada tahun 2023 adalah 54,84 atau dapat dibulatkan menjadi 55 yang berarti bahwa tiap 1000 wanita yang berusia 15 – 49 tahun terdapat ± 55 jiwa. Adapun Angka Kelahiran Umum (GFR) Kabupaten Bandung pada Tahun 2023 adalah 60,51 atau dapat dibulatkan menjadi 61. Angka kelahiran Umum (GFR) tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

c) *Rasio Anak Perempuan (Child Woman Ratio/CWR)*

Rasio anak merupakan perbandingan antara dua kelompok yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Rasio anak dan perempuan, khususnya, mengukur perbandingan antara jumlah anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15 hingga 49 tahun) di suatu wilayah dan periode tertentu.

Rasio ini sangat berguna dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, karena dapat memberikan gambaran tentang kondisi demografi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Rasio Anak dan Perempuan (CWR) juga digunakan untuk menganalisis tingkat fertilitas di suatu wilayah, terutama ketika data kelahiran dan

registrasi tidak tersedia. Untuk menghitung rasio anak dan perempuan, dapat digunakan rumus berikut:

$$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \times 100$$

CWR = Rasio Anak Perempuan

P_{0-4} = Jumlah penduduk di bawah 5 tahun (0-4 tahun)

P_{15-49} = Jumlah penduduk perempuan 15-49 tahun

$$CWR = \frac{277.060}{1.013.310} \times 100 = 27,34$$

Dengan menggunakan rumus di atas diketahui Rasio anak dan perempuan di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 adalah 27,34 atau dibulatkan menjadi 27. Ada kenaikan 1,86 dari tahun sebelumnya, di mana rasio anak dan perempuan di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 adalah 25,48 atau dibulatkan menjadi 25. Untuk mengetahui rasio anak dan perempuan di Kabupaten Bandung, kami sajikan tabel Rasio Anak dan Perempuan per Kecamatan.

Tabel 3.21 Rasio Anak dan Perempuan per Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk Usia 0 - 4 Tahun	Perempuan Usia 15 - 49 Tahun	CWR
1	CILEUNYI	11651	49456	23,56
2	CIMENYAN	7029	29835	23,56
3	CILENGKRANG	3836	14680	26,13
4	BOJONGSOANG	7632	30519	25,01
5	MARGAHAYU	7149	32251	22,17
6	MARGAASIH	11023	41547	26,53
7	KATAPANG	9577	37401	25,61
8	DAYEUHKOLOT	6501	28502	22,81
9	BANJARAN	10119	37260	27,16
10	PAMEUNGPEUK	7522	25680	29,29
11	PANGALENGAN	12266	42653	28,76
12	ARJASARI	8977	30802	29,14
13	CIMAUNG	7102	24616	28,85
14	CICALENGKA	9718	35072	27,71
15	NAGREG	4868	16585	29,35
16	CIKANCUNG	9051	28012	32,31
17	RANCAEKEK	13085	50930	25,69
18	CIPARAY	13471	48438	27,81
19	PACET	11217	33427	33,56
20	KERTASARI	5578	19678	28,35

21	BALEENDAH	19592	74638	26,25
22	MAJALAYA	11984	44423	26,98
23	SOLOKANJERUK	6946	24561	28,28
24	PASEH	12091	38259	31,60
25	IBUN	7975	25415	31,38
26	SOREANG	8639	32765	26,37
27	PASIRJAMBU	6985	25443	27,45
28	CIWIDEY	6656	23602	28,20
29	RANCABALI	3686	14104	26,13
30	CANGKUANG	6364	22889	27,80
31	KUTAWARINGIN	8770	29867	29,36
JUMLAH		277.060	1.013.310	27,34

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rasio anak usia 0-4 tahun dengan penduduk berjenis kelamin perempuan usia 15-49 tahun adalah 27,34. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan berusia produktif terdapat 27 anak – anak berusia di bawah lima tahun. Selain berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa Kecamatan Pacet merupakan daerah yang mempunyai rasio penduduk anak – anak dengan perempuan yang tertinggi di Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut memiliki angka kelahiran paling tinggi di Kabupaten Bandung. Sementara itu, Kecamatan Margahayu merupakan daerah yang mempunyai Rasio anak dan perempuan paling kecil di Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Margahayu memiliki angka kelahiran rendah. Bagi daerah yang memiliki angka kelahiran tinggi harus memikirkan berbagai pelayanan yang harus disiapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Bandung.

b. Kematian

Kematian atau Mortalitas adalah ukuran kematian rata – rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Mortalitas merupakan salah satu komponen penting dalam kependudukan. Mortalitas merupakan informasi penting bagi pihak pemerintah dan swasta dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diketahui melalui indikator kematian. Perhitungan mortalitas terdiri atas

beberapa jenis, seperti: angka kematian bayi, angka kematian kasar, dan angka kematian menurut kelompok umur.

a) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merujuk pada jumlah kematian bayi dalam suatu periode tertentu per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sering digunakan sebagai indikator penting untuk menilai tingkat kesehatan suatu wilayah. Informasi yang diperoleh dari angka kematian bayi dapat mencerminkan faktor-faktor sosial ekonomi dan demografis, seperti kualitas fasilitas medis dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kematian bayi sendiri didefinisikan sebagai kematian yang terjadi pada bayi yang berusia kurang dari satu tahun, mulai dari kelahiran hingga bayi berusia tepat 12 bulan. Namun, dalam prakteknya, perhitungan angka ini seringkali terkendala oleh keterbatasan data yang tersedia.

Kematian bayi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang umumnya dibedakan menjadi faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen meliputi penyakit bawaan yang diturunkan sejak kelahiran atau kekurangan gizi yang dialami ibu selama masa kehamilan. Sementara itu, faktor eksogen berkaitan dengan lingkungan sekitar bayi dan keluarga, seperti kebersihan selama proses persalinan, perawatan bayi yang kurang higienis, serta asupan gizi yang diberikan setelah kelahiran. Semua faktor ini berperan penting dalam menentukan risiko kematian bayi.

Angka kematian bayi umumnya dihitung menggunakan metode tidak langsung dan sering kali digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemajuan dalam pembangunan suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang tidak hanya terbatas pada proses persalinan dan perawatan bayi setelah kelahiran. Pelayanan kesehatan ibu dan anak dimulai jauh sebelum kelahiran, yakni sejak persiapan ibu untuk hamil dan selama masa kehamilan. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan ibu sejak awal untuk memastikan kesejahteraan bayi yang dilahirkan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, jumlah angka kematian bayi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 212 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 angka kematian bayi mencapai 415 jiwa.

b) Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita merujuk pada jumlah kematian anak berusia di bawah lima tahun dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3 kematian balita, sementara pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 10 jiwa. Secara keseluruhan, angka kematian balita di Kabupaten Bandung menunjukkan penurunan yang signifikan. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak memegang peranan penting dalam menurunkan angka kematian bayi setelah kelahiran. Akses yang mudah ke layanan kesehatan, prasarana yang memadai, serta tersedianya tenaga ahli, terutama dalam bidang persalinan, menjadi faktor-faktor kunci dalam pencegahan kematian balita pasca kelahiran.

c) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran. Kematian ibu juga dapat disebabkan karena penyakit yang diderita oleh ibu sewaktu mengandung dan melahirkan, sedangkan penyebab tidak langsung kematian ibu yaitu kehamilan terjadi pada ibu berumur kurang dari 20 tahun (terlalu muda), terjadi pada ibu berumur 35 tahun (terlalu tua), persalinan terjadi dalam interval waktu kurang dari 2 tahun (terlalu sering) dan ibu hamil mempunyai paritas lebih dari 3 (terlalu banyak).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2024 menerangkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) berjumlah 13 kematian. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 terbilang menurun, penurunan ini sangat signifikan. Pada tahun 2023 tercatat Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 40 kematian.

Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam

menyongsong kelahiran. Yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

2. Indikator Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator kualitas dari penduduk. Keberhasilan program pembangunan melalui bidang pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, terwujudnya kesetaraan untuk pendidikan dan terjaminnya kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia, karena kualitas penduduk salah satunya diukur dari indikator pendidikannya.

Indeks pembangunan manusia bisa dikatakan baik jika faktor pendidikannya berpihak kepada masyarakat luas. Kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan Kabupaten/kota dapat dihitung melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pembahasan mengenai pendidikan dalam rangka melihat kualitas penduduk di Kabupaten Bandung akan dilihat menggunakan dua indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing–masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

APK dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia standar yang berkaitan dengan jenjang masing-masing pendidikan.

Nilai APK yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak – anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

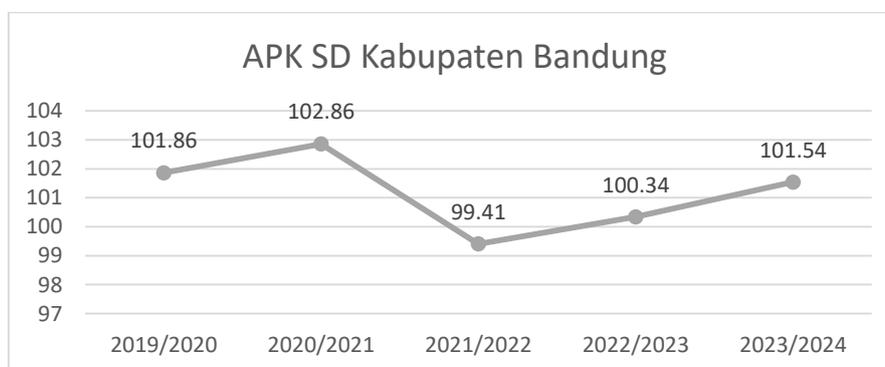
Nilai angka partisipasi kasar Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 sebesar 101,54 %, angka tersebut menunjukkan jumlah anak di Kabupaten Bandung yang bersekolah di tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Tingginya nilai APK di wilayah tersebut dapat dipengaruhi adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu bisa menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, ataupun siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk disuatu jenjang pendidikan yang menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia lebih muda. Adapun faktor budaya, bahwa pada budaya tertentu anak-anak dikatakan layak untuk sekolah di SD jika sudah mampu melakukan sesuatu. Tabel 3.22 menyajikan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Kabupaten Bandung periode tahun 2019 – 2024.

Tabel 3.22 Angka Partisipasi Kasar SD (Sekolah Dasar)

No	Uraian	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Kab.Bandung	101,86	102,86	99,41	100,34	101,54
2	Jumlah Penduduk Usia 7 -12	401.233	399.281	408.729	407.354	408.176
3	Jumlah Seluruh Peserta Didik	408.703	410.681	406.313	402.271	404.672
4	Jumlah Peserta Didik Usia 7 - 12	370.831	380.778	382.649	401.231	381.403

Sumber data : APK APM Kemendikbud Tahun Ajaran 2023/2024

Gambar 3.4 Grafik Angka Partisipasi Kasar SD



Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) APK tahun 2024 sebesar 99,24%. APK jenjang SMP menunjukkan bahwa seberapa banyak lulusan SD ini

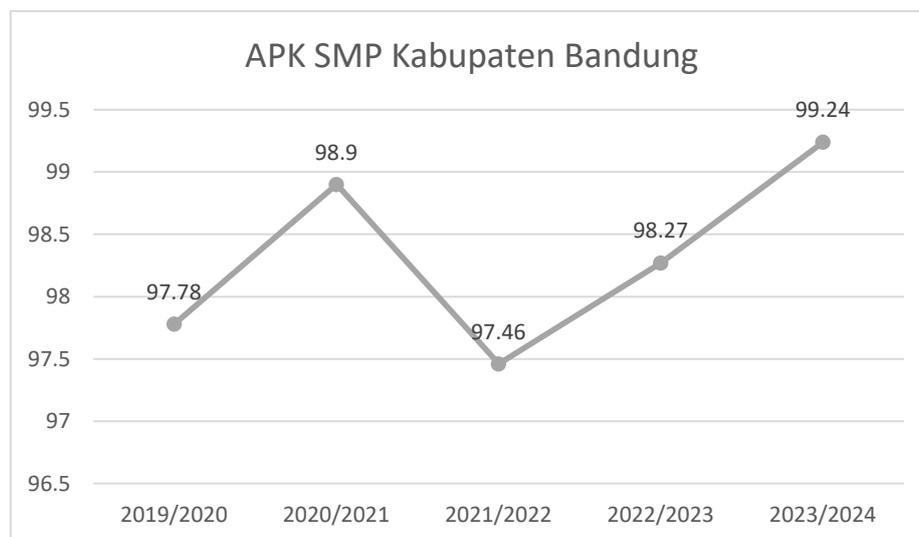
yang melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP. Dengan demikian berdasarkan angka partisipasi kasar SMP terlihat adanya anak – anak yang putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikan SD. Dengan mengetahui angka partisipasi kasar jenjang sekolah menengah pertama maka pemerintahan daerah dapat merencanakan program untuk pencegahan masalah putus sekolah atau pun program – program lainnya yang bisa menekan angka putus sekolah. Tabel 3.23 menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Kabupaten Bandung periode tahun 2019 – 2024.

Tabel 3.23 Angka Partisipas Kasar SMP (Sekolah Menengah Pertama)

No	Uraian	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Kab.Bandung	97,78	98,90	97,46	98,27	99,24
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15	190.356	191.281	193.674	205.532	208.704
3	Jumlah Seluruh Peserta Didik	186.136	189.170	188.753	179.082	196.770
4	Jumlah Peserta Didik Usia 13 - 15	147.622	145.977	148.186	178.271	154.977

Sumber data : APK APM Kemendikbud Tahun Ajaran 2023/2024

Gambar 3.5 Grafik Angka Partisipasi Kasar SMP



Rendahnya angka partisipasi kasar SMP menunjukkan bahwa banyaknya anak usia sekolah menengah pertama yang tidak bersekolah di sekolah menengah pertama.

b. Angka Partisipasi Murni

Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan dengan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok.

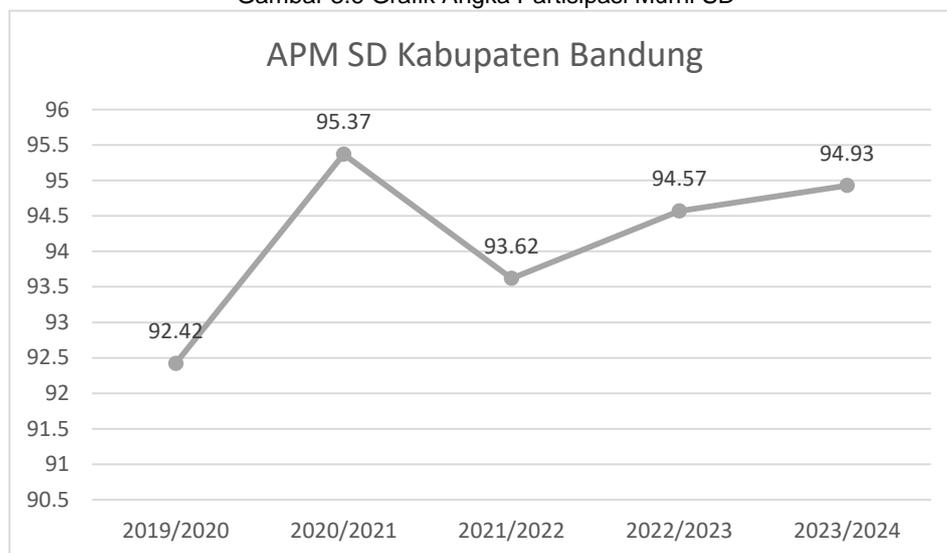
Angka Partisipasi Murni penting bagi pemerintah karena adanya angka partisipasi murni ini pemerintah dapat membuat rencana pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai dengan kelompok umur dan jenjang Pendidikan. Penentuan usia untuk masuk ke jenjang SD yaitu 7 tahun menjadi acuan prediksi angka partisipasi murni SD dan usia SMP 13 tahun. Tabel dibawah ini memperlihatkan angka partisipasi murni untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung.

Tabel 3.24 Angka Partisipasi Murni SD (Sekolah Dasar)

No	Uraian	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Kab.Bandung	92,42	95,37	93,62	94,57	94,93
2	Jumlah Penduduk Usia 7 -12	401.233	399.281	408.729	407.354	408.591
3	Jumlah Seluruh Peserta Didik	408.703	410.681	406.313	402.271	408.685
4	Jumlah Peserta Didik Usia 7 - 12	370.831	380.778	382.649	401.231	382.088

Sumber data : APK APM Kemendikbud Tahun Ajaran 2023/2024

Gambar 3.6 Grafik Angka Partisipasi Murni SD

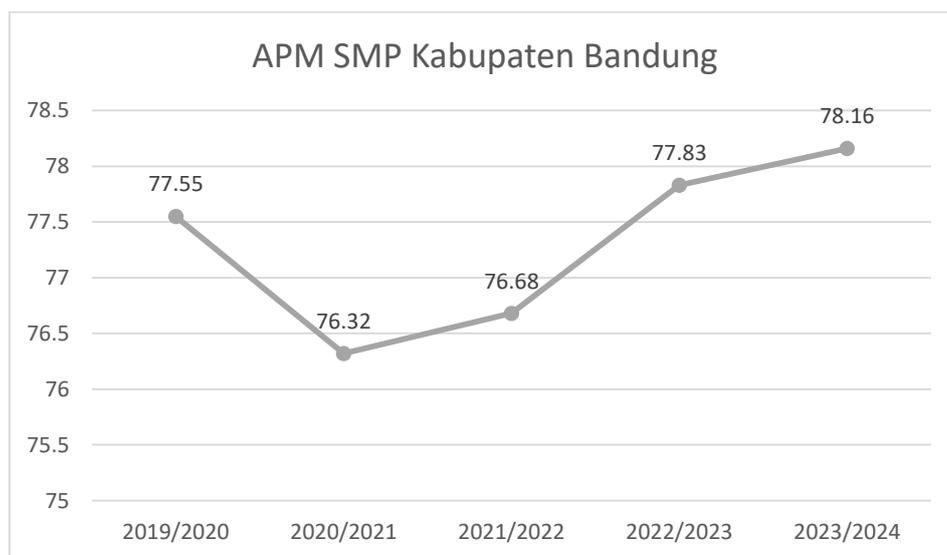


Tabel 3.25 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Kabupaten Bandung

No	Uraian	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Kab.Bandung	77,55	76,32	76,68	77,83	78,16
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15	190.356	191.281	193.674	205.532	208.704
3	Jumlah Seluruh Peserta Didik	186.136	189.170	188.753	179.082	196.770
4	Jumlah Peserta Didik Usia 13 - 15	147.622	145.977	148.186	178.271	154.977

Sumber data : APK APM Kemendikbud Tahun Ajaran 2023/2024

Gambar 3.7 Grafik Angka Partisipasi Murni SMP



3. Indikator Ekonomi

a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambilan kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Di samping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Perhitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Tabel 3.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

No	Kelompok Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah	
		Laki-Laki		Perempuan		Σ	%
		Σ	%	Σ	%		
1	Belum/Tidak Bekerja	497.570	25,4646	423.835	22,4757	921.405	23,9967
2	Pelajar/Mahasiswa	385.519	19,7300	332.390	17,6264	717.909	18,6969
3	Pensiunan	16.204	0,8293	7.617	0,4039	23.821	0,6204
4	Aparatur/Pejabat Negara	36.981	1,8926	17.556	0,9310	54.537	1,4203
5	Tenaga Pengajar	8.468	0,4334	14.338	0,7603	22.806	0,5939
6	Wiraswasta	977.462	50,0244	124.468	6,6005	1.101.930	28,6982
7	Pertanian/Peternakan	29.338	1,5015	2.732	0,1449	32.070	0,8352
8	Nelayan/Perikanan	118	0,0060	9	0,0005	127	0,0033
9	Bidang Keagamaan/Kepercayaan	451	0,0231	59	0,0031	510	0,0133
10	Bidang Kesehatan	1.336	0,0684	4.926	0,2612	6.262	0,1631
11	Lainnya	524	0,0268	957.820	50,7925	958.344	24,9587
Jumlah		1.953.971	100	1.885.750	100	3.839.721	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Kabupaten Bandung mempunyai pekerjaan yang beragam. Selanjutnya untuk mengetahui Proporsi Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung kami sajikan Tabel 3.27

Tabel 3.27 Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	%
	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
15 - 19	155.083	5,88	149.529	5,67	304.612	11,56
20 - 24	175.023	6,64	166.882	6,33	341.905	12,97
25 - 29	160.618	6,09	149.056	5,65	309.674	11,75
30 - 34	146.472	5,56	139.450	5,29	285.922	10,85
35 - 39	131.666	4,99	124.169	4,71	255.835	9,71
40 - 44	149.777	5,68	146.204	5,55	295.981	11,23
45 - 49	136.609	5,18	138.020	5,24	274.629	10,42
50 - 54	117.968	4,48	118.016	4,48	235.984	8,95
55 - 59	94.936	3,60	93.683	3,55	188.619	7,16
60 - 64	71.111	2,70	71.692	2,72	142.803	5,42
Jumlah	1.339.263	50,81	1.296.701	49,19	2.635.964	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

$$\%Naker = \frac{\sum Pddk_{15th+}}{\sum Pddk} \times 100$$

$$\%Naker = \frac{2.635.964}{3.839.721} \times 100 = 68,64\%$$

Dari perhitungan, persentase tenaga kerja di Kabupaten Bandung tahun 2024 mencapai angka 68,64%. Persentase tenaga kerja ini mengalami penurunan sebesar 0,34% dari persentase tenaga kerja di tahun 2023 yang mencapai 68,98%.

b. Proporsi Penduduk Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerja (menganggur) atau yang aktif secara ekonomi (kecuali ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan) dan atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.28 Proporsi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung

Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-Laki	%	Perempuan	%		
15-19	33.317	2,59	29.194	2,27	62.511	4,86
20-24	68.821	5,35	25.463	1,98	94.284	7,32
25-29	128.642	9,99	27.971	2,17	156.613	12,16
30-34	141.234	10,97	27.714	2,15	168.948	13,12
35-39	130.799	10,16	22.322	1,73	153.121	11,89
40-44	149.536	11,61	23.503	1,83	173.039	13,44
45-49	136.538	10,61	20.915	1,62	157.453	12,23
50-54	117.869	9,16	16.704	1,30	134.573	10,45
55-59	94.069	7,31	13.982	1,09	108.051	8,39
60-64	68.231	5,30	10.633	0,83	78.864	6,13
Jumlah	1.069.056	83,04	218.401	16,96	1.287.457	100

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II Tahun 2024

Persentase proporsi Angkatan kerja di Kabupaten Bandung tahun 2024 adalah 33,53%. Angka persentase tersebut didapat dari jumlah proporsi Angkatan kerja di bagi jumlah penduduk. Dibandingkan tahun sebelumnya persentase proporsi Angkatan kerja mengalami penurunan, persentase Angkatan kerja pada tahun 2023 adalah 56,44 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 bidang ekonomi secara nasional tidak mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung semakin sedikit.

Penduduk yang tidak bekerja adalah Angkatan kerja yang mencari kerja/menganggur. Banyaknya jumlah penduduk Angkatan kerja yang tidak bekerja menjadi beban atau masalah pembangunan di Kabupaten Bandung. Berikut Proporsi Penduduk Tidak Bekerja di Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Tabel 3.29 Proporsi Penduduk Tidak Bekerja

Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-Laki	%	Perempuan	%		
15-19	31.934	2,368	28.848	2,139	60.782	4,507
20-24	32.652	2,421	18.892	1,401	51.544	3,822
25-29	26.223	1,945	7.868	0,583	34.091	2,528
30-34	13.049	0,968	3.460	0,257	16.509	1,224
35-39	5.660	0,420	1.867	0,138	7.527	0,558
40-44	3.553	0,263	1.372	0,102	4.925	0,365
45-49	1.797	0,133	1.008	0,075	2.805	0,208
50-54	1.114	0,083	805	0,060	1.919	0,142
55-59	919	0,068	751	0,056	1.670	0,124
60-64	845	0,063	778	0,058	1.623	0,120
Jumlah	117.746	8,732	65.649	4,868	183.395	13,600

Sumber Data : Data hasil konsolidasi kemendagri semester II tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi tidak bekerja di Kabupaten Bandung adalah 183.395 orang atau 14,25 % dari total Angkatan kerja di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan angka proporsi tidak bekerja 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 186.310 orang atau 8,86 %. total Angkatan kerja.

c. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 3.30 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung

Penduduk	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Produktif (15-64 Th)	1.339.263	1.296.701	2.635.964
Angkatan Kerja (15-64 Th)	1.069.056	218.401	1.287.457
APAK	79,82	16,84	48,84

Sumber : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kabupaten Bandung adalah 48,84%. Angka ini menunjukkan bahwa 48,84% dari penduduk usia 15-64 tahun merupakan mereka yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, angka APAK untuk laki-laki di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 79,82%, sementara angka APAK untuk perempuan adalah 16,84%. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana angka APAK laki-laki tercatat 81,37% dan perempuan 83,33%. Pada tahun ini, proporsi perempuan usia produktif yang terlibat dalam dunia kerja mengalami penurunan signifikan dibandingkan laki-laki.

4. Indikator Sosial

a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan, kesulitan, atau gangguan yang menghalangi mereka dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Akibatnya, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, serta perubahan lingkungan yang mendadak, seperti terjadinya bencana.

Proporsi penduduk penyandang cacat didefinisikan sebagai individu yang mengalami kelainan fisik atau mental yang mengganggu dan membatasi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara wajar. Sedangkan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per

bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran.

Tabel berikut menyajikan data mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung pada tahun 2024.

Tabel 3.31 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung

No	Kategori PMKS	Jumlah
1	FAKIR MISKIN	345.036
2	LANJUT USIA TERLANTAR	12.978
3	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL	9.103
4	PENYANDANG DISABILITAS	4.994
5	ANAK TERLANTAR	2.746
6	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	1.542
7	ANAK BALITA TERLANTAR	474
8	PEMULUNG	382
9	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	346
10	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	255
11	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	158
12	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN	109
13	KORBAN BENCANA SOSIAL	106
14	PENGEMIS	96
15	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	88
16	KORBAN BENCANA ALAM	83
17	KELOMPOK MINORITAS	65
18	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	54
19	ANAK JALANAN	28
20	TUNA SUSILA	20
21	ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	14
22	GELANDANGAN	13
23	KORBAN TINDAK KEKERASAN	6
24	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN	5
25	KORBAN TRAFFICKING	4
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0
Jumlah		378.702

Sumber : Data PPKS Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis PMKS terbesar di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mayoritas adalah Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin dengan jumlah mencapai 345.036 orang.

b. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Proporsi penduduk penyandang cacat menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin. Untuk menghitung angka penyandang cacat menggunakan rumus :

$$APC = \frac{\sum PC}{\sum Pddk} \times 100$$

APC = Angka Penyandang Cacat

$\sum PC$ = Jumlah Penyandang Cacat

$\sum Pddk$ = Jumlah Penduduk

Tabel 3.32 Tabel Angka Penyandang Cacat

Kecamatan	Penduduk Penyandang			Jumlah Penduduk	Angka Penyandang Cacat
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
CILEUNYI	132	92	224	182.960	0,122
CIMENYAN	70	52	122	113.143	0,108
CILENGKRANG	26	25	51	55.434	0,092
BOJONGSOANG	102	67	169	112.096	0,151
MARGAHAYU	103	57	160	121.023	0,132
MARGAASIH	93	67	160	154.454	0,104
KATAPANG	83	59	142	138.694	0,102
DAYEUKOLOLOT	72	39	111	106.402	0,104
BANJARAN	97	49	146	142.033	0,103
PAMEUNGPEUK	61	44	105	95.615	0,110
PANGALENGAN	134	79	213	167.958	0,127
ARJASARI	63	44	107	117.173	0,091
CIMAUNG	74	34	108	95.383	0,113
CICALENGKA	120	72	192	131.388	0,146
NAGREG	51	40	91	62.712	0,145
CIKANCUNG	69	27	96	106.420	0,090
RANCAEKEK	128	96	224	191.631	0,117
CIPARAY	85	56	141	185.020	0,076
PACET	65	44	109	130.443	0,084
KERTASARI	36	19	55	76.136	0,072
BALEENDAH	172	123	295	277.790	0,106
MAJALAYA	71	42	113	170.250	0,066
SOLOKANJERUK	78	42	120	93.155	0,129
PASEH	85	55	140	146.839	0,095
IBUN	39	44	83	96.415	0,086
SOREANG	80	47	127	123.211	0,103
PASIRJAMBU	56	34	90	98.727	0,091

CIWIDEY	113	89	202	93.069	0,217
RANCABALI	30	20	50	54.330	0,092
CANGKUANG	59	36	95	86.927	0,109
KUTAWARINGIN	59	46	105	112.890	0,093
Jumlah	2.506	1.640	4.146	3.839.721	0,108

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Angka penduduk penyandang cacat di Kabupaten Bandung tahun 2024 sebesar 0,108%. Artinya bahwa Sebagian kecil penduduk di Kabupaten Bandung menyandang cacat. Namun ini tetap menjadi perhatian pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Indikator ini berguna untuk Menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penyandang cacat.

C. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan elemen penting dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas ini tidak hanya menjadi penyebab, tetapi juga menerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu wilayah. Dalam menganalisis perkembangan penduduk suatu daerah, selain memperhatikan kuantitas dan kualitas penduduk yang diukur melalui berbagai indikator seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial, data terkait mobilitas penduduk juga memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak tepat untuk hanya menilai mobilitas penduduk dari sudut pandang positif atau negatif terhadap pembangunan, tanpa mempertimbangkan dampak baik yang ditimbulkannya. Proses pembangunan tidak dapat berlangsung tanpa adanya mobilitas penduduk, namun penyebaran penduduk yang terarah juga tidak akan tercapai tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks administrasi kependudukan, mobilitas penduduk sering disebut sebagai migrasi penduduk. Migrasi penduduk yang akan dibahas dalam subbab ini mencakup migrasi masuk dan migrasi keluar.

1. Migrasi Masuk

Migrasi masuk didefinisikan sebagai masuknya penduduk kesuatu daerah tujuan. Data migrasi yang kita sajikan di sub bab ini adalah data penduduk yang masuk ke daerah kecamatan yang ada di kabupaten Bandung. Berikut tabel migrasi masuk atau pindah datang di Kabupaten Bandung tahun 2024 semester 2.

Tabel 3.33 Migrasi Masuk (Datang) di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
CILEUNYI	1.059	3.802	4.861
CIMENYAN	519	1.767	2.286
CILENGKRANG	289	1.012	1.301
BOJONGSOANG	706	2.426	3.132
MARGAHAYU	653	2.167	2.820
MARGAASIH	744	2.523	3.267
KATAPANG	996	3.333	4.329
DAYEUHKOLOT	493	1.683	2.176
BANJARAN	922	3.051	3.973
PAMEUNGPEUK	829	2.862	3.691
PANGALENGAN	904	2.746	3.650
ARJASARI	852	2.873	3.725
CIMAUNG	578	1.814	2.392
CICALENGKA	695	2.285	2.980
NAGREG	279	1.026	1.305
CIKANCUNG	534	1.689	2.223
RANCAEKEK	994	3.498	4.492
CIPARAY	1.062	3.185	4.247
PACET	580	1.865	2.445
KERTASARI	260	801	1.061
BALEENDAH	1.802	6.212	8.014
MAJALAYA	872	2.718	3.590
SOLOKANJERUK	511	1.738	2.249
PASEH	785	2.459	3.244
IBUN	484	1.441	1.925
SOREANG	632	2.428	3.060
PASIRJAMBU	562	1.610	2.172
CIWIDEY	510	1.460	1.970
RANCABALI	271	775	1.046
CANGKUANG	635	2.237	2.872
KUTAWARINGIN	588	1.798	2.386
Jumlah	21.600	71.284	92.884

Sumber : Database hasil konsolidasi kemendagri semester II tahun 2024

Migrasi masuk di Kabupaten Bandung dalam tahun 2024 di semester II berjumlah 92.884 jiwa. Didominasi daerah Kecamatan Cileunyi. Untuk migrasi masuk antar kabupaten/kota pada tahun ini mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Migrasi masuk antar Kabupaten/Kota pada tahun 2023 tercatat 19.929 penduduk.

2. Migrasi Keluar

Migrasi keluar didefinisikan sebagai perpindahan penduduk keluar dari daerah asal. Data migrasi keluar yang disajikan pada sub bab ini adalah data penduduk yang keluar dari daerah kecamatan yang ada di kabupaten Bandung. Tabel berikut menyajikan data penduduk mutasi keluar di Kabupaten Bandung tahun 2024 semester 2.

Tabel 3.34 Migrasi Keluar (Pindah) di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
CILEUNYI	2.246	2.177	4.423
CIMENYAN	1.210	1.165	2.375
CILENGKRANG	588	601	1.189
BOJONGSOANG	1.505	1.472	2.977
MARGAHAYU	1.752	1.727	3.479
MARGAASIH	1.875	1.887	3.762
KATAPANG	1.943	1.882	3.825
DAYEUHKOLOT	1.532	1.529	3.061
BANJARAN	2.042	1.992	4.034
PAMEUNGPEUK	1.560	1.613	3.173
PANGALENGAN	2.006	1.970	3.976
ARJASARI	1.336	1.265	2.601
CIMAUNG	1.245	1.129	2.374
CICALENGKA	1.588	1.536	3.124
NAGREG	732	676	1.408
CIKANCUNG	1.173	1.097	2.270
RANCAEKEK	2.566	2.516	5.082
CIPARAY	2.355	2.215	4.570
PACET	1.327	1.260	2.587
KERTASARI	689	678	1.367
BALEENDAH	3.721	3.652	7.373
MAJALAYA	2.161	2.120	4.281
SOLOKANJERUK	1.206	1.177	2.383
PASEH	1.762	1.576	3.338
IBUN	1.019	932	1.951
SOREANG	1.597	1.692	3.289
PASIRJAMBU	1.279	1.285	2.564
CIWIDEY	1.142	1.015	2.157
RANCABALI	643	649	1.292
CANGKUANG	1.263	1.312	2.575
KUTAWARINGIN	1.145	1.058	2.203
Jumlah	48.208	46.855	95.063

Sumber : Database hasil konsolidasi kemendagri semester II tahun 2024

Selama tahun 2024 di semester II ada 95.063 penduduk Kabupaten Bandung yang mengajukan permohonan pindah domisili keluar Kabupaten Bandung. Sementara itu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mengajukan migrasi keluar antar kabupaten kota di tahun 2023 adalah sebanyak 19.345 penduduk.



Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung

Tahun 2024

Kuantitas Penduduk

- Jumlah penduduk meningkat 3,13% dari 2023
- Kepadatan penduduk 2.179 jiwa/km²
- LPP 1,30%
- Usia produktif 68,65%
- Rasio ketergantungan 45,66%

Indikator Kesehatan

- Angka kelahiran 55.580 jiwa
- Angka kematian bayi 212 jiwa

Indikator Sosial

- Jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial 385.516 jiwa
- Jumlah penduduk penyandang disabilitas 0,108%

Indikator Pendidikan

- APK SD 101,53%
- APK SMP 99,23%
- APM SD 94,93%
- APM SMP 77,83%

Indikator Ekonomi

- Jumlah tenaga kerja 2.635.964 jiwa
- Jumlah angkatan kerja 1.287.457 jiwa

Mobilitas Penduduk

- Total migrasi masuk 92.884 jiwa
- Total migrasi keluar 95.063 jiwa

BAB IV KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data mengenai susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Setiap keluarga wajib memiliki kartu ini. KK berisi informasi lengkap tentang identitas kepala keluarga serta anggota keluarganya. Fungsi utama Kartu Keluarga adalah sebagai database warga negara Indonesia, yang menjadi dasar pembuatan berbagai surat penting, seperti KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya. Yang dimaksud dengan Kartu Keluarga dalam konteks ini adalah Kartu Keluarga yang pertama kali diterbitkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kepemilikan dokumen Kartu Keluarga merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai indikator kinerja, persentase kepemilikan Kartu Keluarga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, terdapat 1.268.509 Kartu Keluarga yang tercatat di Kabupaten Bandung, dengan total data keluarga sebanyak 1.268.509. Terdapat selisih 15.301 Kartu Keluarga yang statusnya belum tercetak. Pada tahun 2023, persentase kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bandung mencapai 99,96%. Sementara itu, pada tahun 2024, persentase kepemilikan Kartu Keluarga menurun menjadi 98,79%. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, tabel berikut menyajikan jumlah kepemilikan dokumen Kartu Keluarga di Kabupaten Bandung per kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 4.1 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga

Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah KK sudah cetak	Jumlah KK belum cetak	Rasio Kepemilikan KK (%)
CILEUNYI	58.467	58.011	456	99,22
CIMENYAN	37.918	37.611	307	99,19
CILENGKRANG	18.299	18.159	140	99,23
BOJONGSOANG	36.370	36.020	350	99,04
MARGAHAYU	39.304	39.006	298	99,24
MARGAASIH	49.277	48.805	472	99,04
KATAPANG	45.107	44.595	512	98,86
DAYEUKHKOLOT	35.596	35.149	447	98,74
BANJARAN	47.938	47.277	661	98,62

PAMEUNGPEUK	31.536	31.091	445	98,59
PANGALENGAN	58.648	57.685	963	98,36
ARJASARI	39.015	38.681	334	99,14
CIMAUNG	33.345	32.800	545	98,37
CICALENGKA	42.416	41.911	505	98,81
NAGREG	20.271	20.096	175	99,14
CIKANCUNG	33.713	33.250	463	98,63
RANCAEKEK	62.543	62.029	514	99,18
CIPARAY	61.392	60.558	834	98,64
PACET	42.162	41.469	693	98,36
KERTASARI	25.939	25.688	251	99,03
BALEENDAH	89.446	88.252	1.194	98,67
MAJALAYA	56.436	55.549	887	98,43
SOLOKANJERUK	31.549	31.108	441	98,60
PASEH	46.954	46.496	458	99,02
IBUN	31.430	31.000	430	98,63
SOREANG	41.149	40.720	429	98,96
PASIRJAMBU	34.209	33.718	491	98,56
CIWIDEY	32.812	32.217	595	98,19
RANCABALI	19.412	19.135	277	98,57
CANGKUANG	28.803	28.397	406	98,59
KUTAWARINGIN	37.053	36.725	328	99,11
Jumlah	1.268.509	1.253.208	15.301	98,79

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki persentase kepemilikan kartu keluarga tertinggi ada di wilayah Kecamatan Margahayu 99,24 % dan wilayah dengan persentase terendah ada di wilayah Kecamatan Pangalengan dan Kecamatan Ciwidey yaitu 98,19 %.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Saat ini, Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el) telah diterapkan di seluruh Indonesia. KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, yang berarti baik dari segi fisik maupun penggunaannya, KTP ini berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Februari 2011 dan dilaksanakan dalam dua tahap.

Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, yang kemudian mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : untuk WNI, dilakukan di Kecamatan dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana .
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perekaman sidik jari diatur Peraturan Menteri.

Program KTP Elektronik mengusung konsep satu KTP untuk satu identitas, yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah Single Identity Number (SIN). Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki identitas tunggal. Kepemilikan KTP elektronik merupakan hak setiap warga negara dan juga syarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik. Data mengenai kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Kepemilikan KTP Elektronik

Kecamatan	Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Persentase Kepemilikan (%)
CILEUNYI	133.313	132.800	99,62
CIMENYAN	83.692	83.451	99,71
CILENGKRANG	40.343	40.226	99,71
BOJONGSOANG	81.909	81.667	99,70
MARGAHAYU	90.326	90.058	99,70
MARGAASIH	110.116	109.606	99,54
KATAPANG	99.516	99.131	99,61
DAYEUKHKOLOT	78.479	78.224	99,68
BANJARAN	101.776	101.324	99,56
PAMEUNGPEUK	67.714	67.407	99,55
PANGALENGAN	119.416	118.552	99,28
ARJASARI	82.673	82.351	99,61
CIMAUNG	68.499	68.254	99,64
CICALENGKA	93.453	92.991	99,51
NAGREG	44.182	44.009	99,61
CIKANCUNG	73.028	72.734	99,60
RANCAEKEK	138.307	137.766	99,61
CIPARAY	131.556	131.001	99,58
PACET	89.208	88.769	99,51
KERTASARI	54.022	53.741	99,48
BALEENDAH	197.525	196.712	99,59
MAJALAYA	121.497	120.981	99,58
SOLOKANJERUK	66.334	66.153	99,73
PASEH	101.464	101.013	99,56
IBUN	67.285	66.959	99,52
SOREANG	88.945	88.534	99,54
PASIRJAMBU	70.716	70.513	99,71
CIWIDEY	66.639	66.414	99,66
RANCABALI	39.272	39.087	99,53
CANGKUANG	62.026	61.810	99,65
KUTAWARINGIN	79.554	79.245	99,61
Jumlah	2.742.785	2.731.483	99,59

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, jumlah kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mencapai 99,59%, atau sebanyak 2.731.483 jiwa, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, persentase kepemilikan KTP elektronik tercatat sebesar 97,89%, dengan jumlah 2.600.823 jiwa. Pada tahun 2024, target kepemilikan KTP elektronik diharapkan mencapai 100%. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai

pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya KTP elektronik, diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut.

C. Kepemilikan Akta

Akta pencatatan sipil adalah dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Akta ini merupakan pengakuan resmi dari negara terhadap status keperdataan seseorang, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam konteks pelayanan legal lainnya. Jenis-jenis akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah bukti hukum yang mengesahkan hubungan keperdataan antara seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut tercantum nama kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Jika seorang ibu melahirkan tanpa tercatatnya ayah atau jika status perkawinan orang tua tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya akan mencantumkan nama ibu. Dalam hal ini, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu saja. Kepemilikan akta kelahiran sangat penting untuk memperoleh berbagai pelayanan publik, seperti pendidikan, hak waris, pengurusan paspor, dan dokumen lainnya.

Pemerintah menetapkan target cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagai prioritas nasional. Pada tahun 2023, kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Bandung telah mencapai 90,53%. Kemudian tahun 2024 kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 mengalami kenaikan menjadi 91,02 %. Meskipun demikian, persentase ini masih belum memenuhi target nasional, yang ditetapkan sebesar 93% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung terus berupaya melalui berbagai program, seperti pelayanan jemput bola ke desa-desa atau kelurahan, serta penyelenggaraan layanan pembuatan akta kelahiran di tingkat kecamatan. Data terbaru mengenai kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun

Kecamatan	Penduduk Usia 0-17 Tahun	Kepemilikan Akta 0-17 Tahun	Rasio Kepemilikan Akta (%)
CILEUNYI	52.030	48.925	94,03
CIMENYAN	30.709	28.882	94,05
CILENGKRANG	15.839	15.097	95,32
BOJONGSOANG	31.460	29.582	94,03
MARGAHAYU	32.157	30.630	95,25
MARGAASIH	45.974	41.440	90,14
KATAPANG	40.803	37.908	92,90
DAYEUHKOLOT	29.062	26.895	92,54
BANJARAN	42.072	38.120	90,61
PAMEUNGPEUK	28.919	26.469	91,53
PANGALENGAN	50.756	43.510	85,72
ARJASARI	35.900	31.861	88,75
CIMAUNG	27.993	25.671	91,71
CICALENGKA	39.776	36.100	90,76
NAGREG	19.326	17.642	91,29
CIKANCUNG	34.829	31.171	89,50
RANCAEKEK	55.460	51.136	92,20
CIPARAY	55.527	50.613	91,15
PACET	42.672	36.226	84,89
KERTASARI	23.194	20.470	88,26
BALEENDAH	83.493	76.432	91,54
MAJALAYA	50.477	44.835	88,82
SOLOKANJERUK	27.821	25.058	90,07
PASEH	46.668	41.403	88,72
IBUN	30.550	28.394	92,94
SOREANG	35.918	33.763	94,00
PASIRJAMBU	29.207	26.325	90,13
CIWIDEY	27.397	25.238	92,12
RANCABALI	15.739	14.559	92,50
CANGKUANG	25.899	24.068	92,93
KUTAWARINGIN	34.626	31.240	90,22
Jumlah	1.142.253	1.039.663	91,02

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Dari tabel di atas terlihat wilayah kecamatan yang mempunyai persentase paling tinggi kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun yaitu wilayah kecamatan Cilengkrang sebesar 95,32 % dan wilayah kecamatan yang memiliki persentase

rendah untuk kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun adalah wilayah kecamatan Pacet sebesar 84,89%.

2. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah dokumen resmi yang menetapkan status hukum seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Akta ini berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang berstatus kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta tersebut. Data mengenai persentase kepemilikan akta perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan

Kecamatan	Jumlah Wajib Akta Perkawinan	Memiliki Akta Perkawinan	Belum Memiliki Akta Perkawinan	Presentase (%)
CILEUNYI	88.785	67.329	21.456	75,83
CIMENYAN	57.091	40.341	16.750	70,66
CILENGKRANG	28.134	21.415	6.719	76,12
BOJONGSOANG	55.502	40.805	14.697	73,52
MARGAHAYU	58.298	41.913	16.385	71,89
MARGAASIH	75.173	52.302	22.871	69,58
KATAPANG	68.104	51.684	16.420	75,89
DAYEUKHKOLOT	52.029	37.025	15.004	71,16
BANJARAN	70.473	50.884	19.589	72,20
PAMEUNGPEUK	47.064	35.832	11.232	76,13
PANGALENGAN	88.639	61.396	27.243	69,27
ARJASARI	59.588	41.846	17.742	70,23
CIMAUNG	50.287	38.023	12.264	75,61
CICALENGKA	62.725	49.332	13.393	78,65
NAGREG	30.279	25.557	4.722	84,41
CIKANCUNG	51.945	33.072	18.873	63,67
RANCAEKEK	93.962	70.987	22.975	75,55
CIPARAY	90.691	62.870	27.821	69,32
PACET	64.374	39.157	25.217	60,83
KERTASARI	39.733	29.712	10.021	74,78
BALEENDAH	135.137	101.218	33.919	74,90
MAJALAYA	83.340	56.867	26.473	68,23
SOLOKANJERUK	47.211	32.477	14.734	68,79
PASEH	71.759	50.197	21.562	69,95
IBUN	48.633	33.114	15.519	68,09
SOREANG	61.112	45.592	15.520	74,60

PASIRJAMBU	50.835	36.425	14.410	71,65
CIWIDEY	48.363	33.070	15.293	68,38
RANCABALI	29.266	20.770	8.496	70,97
CANGKUANG	43.825	30.815	13.010	70,31
KUTAWARINGIN	57.722	38.329	19.393	66,40
Jumlah	1.910.079	1.370.356	539.723	71,74

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Persentase kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Bandung hingga tahun 2024 adalah 71,74% dari total perkawinan sebanyak 1.910.079 perkawinan. Kecamatan Nagreg menjadi kecamatan yang memiliki persentase kepemilikan akta perkawinan tertinggi yaitu sebesar 84,41%. Sedangkan kecamatan Pacet menjadi kecamatan yang memiliki persentase kepemilikan akta perkawinan terendah yaitu sebesar 60,83%.

3. Akta Perceraian

Akta Perceraian adalah dokumen resmi yang menjadi bukti sah mengenai putusannya ikatan perceraian. Jika Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka proses perceraian harus melalui Pengadilan Negeri. Setelah adanya keputusan dari Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap, akta perceraian akan diterbitkan.

Persentase kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta tersebut. Data persentase kepemilikan akta perceraian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian

Kecamatan	Jumlah Wajib Akta Perceraian	Memiliki Akta Perceraian	Belum Memiliki Akta Perceraian	Presentase (%)
CILEUNYI	3.561	2.634	927	73,97
CIMENYAN	2.584	1.620	964	62,69
CILENGKRANG	1.099	759	340	69,06
BOJONGSOANG	2.421	1.447	974	59,77
MARGAHAYU	2.455	1.696	759	69,08
MARGAASIH	2.515	1.414	1.101	56,22
KATAPANG	3.056	1.854	1.202	60,67
DAYEUKHKOLOT	2.287	1.314	973	57,46
BANJARAN	3.000	1.614	1.386	53,80
PAMEUNGPEUK	1.890	1.209	681	63,97

PANGALENGAN	2.239	882	1.357	39,39
ARJASARI	2.311	1.446	865	62,57
CIMAUNG	1.564	923	641	59,02
CICALENGKA	2.179	1.234	945	56,63
NAGREG	944	584	360	61,86
CIKANCUNG	1.438	628	810	43,67
RANCAEKEK	3.450	2.173	1.277	62,99
CIPARAY	3.216	1.702	1.514	52,92
PACET	1.504	438	1.066	29,12
KERTASARI	962	335	627	34,82
BALEENDAH	4.967	2.882	2.085	58,02
MAJALAYA	2.822	1.724	1.098	61,09
SOLOKANJERUK	1.413	722	691	51,10
PASEH	2.243	1.270	973	56,62
IBUN	1.766	1.091	675	61,78
SOREANG	2.935	1.772	1.163	60,37
PASIRJAMBU	1.866	1.052	814	56,38
CIWIDEY	1.772	876	896	49,44
RANCABALI	944	464	480	49,15
CANGKUANG	1.641	1.036	605	63,13
KUTAWARINGIN	2.160	1.273	887	58,94
Jumlah	69.204	40.068	29.136	57,90

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024

Persentase kepemilikan akta perceraian di Kabupaten Bandung hingga tahun 2024 adalah 57,90% dari total perceraian sebanyak 69.204 perceraian. Kecamatan Cileunyi menjadi kecamatan yang memiliki persentase kepemilikan akta perceraian tertinggi yaitu sebesar 73,97%. Sedangkan kecamatan Pacet menjadi kecamatan yang memiliki persentase kepemilikan akta perceraian terendah yaitu sebesar 29,12%.

4. Akta Kematian

Kepemilikan akta kematian hingga tahun 2024 di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 62.072 akta kematian dengan rincian 37.871 adalah akta kematian milik laki-laki dan 24.201 adalah akta kematian milik perempuan.

Tabel 4.6 Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian

Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
320405	CILEUNYI	2347	1385	3732
320406	CIMENYAN	1496	983	2479
320407	CILENGKRANG	742	504	1246
320408	BOJONGSOANG	1331	775	2106
320409	MARGAHAYU	2772	1837	4609
320410	MARGAASIH	2217	1452	3669
320411	KATAPANG	1467	847	2314
320412	DAYEUKHKOLOT	1298	801	2099
320413	BANJARAN	1184	785	1969
320414	PAMEUNGPEUK	723	507	1230
320415	PANGALENGAN	838	642	1480
320416	ARJASARI	1347	897	2244
320417	CIMAUNG	463	249	712
320425	CICALENGKA	1392	915	2307
320426	NAGREG	846	552	1398
320427	CIKANCUNG	393	206	599
320428	RANCAEKEK	2378	1445	3823
320429	CIPARAY	1576	945	2521
320430	PACET	377	198	575
320431	KERTASARI	935	677	1612
320432	BALEENDAH	1617	1005	2622
320433	MAJALAYA	652	416	1068
320434	SOLOKANJERUK	460	317	777
320435	PASEH	1188	734	1922
320436	IBUN	923	563	1486
320437	SOREANG	1424	908	2332
320438	PASIRJAMBU	681	450	1131
320439	CIWIDEY	689	465	1154
320440	RANCABALI	541	335	876
320444	CANGKUANG	665	433	1098
320446	KUTAWARINGIN	1003	551	1554
Note : Masuk wilayah Kab tetapi kode Kec/Kel kosong		1906	1422	3328
Jumlah		37871	24201	62072

Sumber Data : Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II 2024



Kepemilikan Dokumen Kependudukan Warga Kabupaten Bandung

Tahun 2024

Kartu Keluarga

Jumlah
kepemilikan
kartu keluarga di
Kabupaten
Bandung sebesar
1.253.208



KTP - EL

Jumlah
kepemilikan
KTP - EL di
Kabupaten
Bandung
sebesar
2.731.483

Akta Kelahiran

Jumlah
kepemilikan
akta kelahiran di
Kabupaten
Bandung
sebesar
1.039.663

Akta Perkawinan

Jumlah
kepemilikan
akta
perkawinan di
Kabupaten
Bandung
sebesar
1.370.356

Akta Perceraian

Jumlah
kepemilikan
akta
perceraian di
Kabupaten
Bandung
sebesar
40.068

Akta Kematian

Jumlah
kepemilikan
akta kematian
di Kabupaten
Bandung
sebesar 62.072



BAB V KESIMPULAN

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Data kependudukan yang akurat menjadi prasyarat dalam perencanaan pembangunan tersebut. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar berkaitan dengan dengan isu – isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Bandung.

Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepannya pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk serta pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya – upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

Isu dan masalah pembangunan yang dihadapi antara lain : Resistensi nilai nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi yang ditandai dengan timbulnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima, adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintah, perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti

kelahiran, kematian, dan migrasi. Angka LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) Kabupaten Bandung masih relatif terkendali ada diangka 1,74 %, namun terus meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya perlu menjadi bahan pertimbangan yang serius dalam perencanaan pembangunan, sehingga bonus demografi dapat secara optimal mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 berjumlah 2.635.964 jiwa yaitu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 2.568.298 jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung, pemerintah daerah harus mengambil kebijakan dan program – program yang memanfaatkan kondisi besarnya jumlah penduduk di usia produktif tersebut. Sehingga mampu mendorong pembangunan daerah Kabupaten Bandung kearah yang lebih baik.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang perkembangan kependudukan, maka profil perkembangan kependudukan disajikan secara berkala dengan menyajikan data yang lebih valid dan akurat.

